



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2017**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG¹**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik memuat informasi yang diperlukan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengandung informasi tentang analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tahun yang bersangkutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan pendekatan yang dianut oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menggunakan prinsip *self assessment* yang mengisyaratkan kepada unit-unit instansi pemerintah, untuk dapat menyusun perencanaan strategisnya sendiri dan mengimplementasikannya ke dalam perencanaan operasional jangka pendek yang sesuai dengan kebutuhan setempat dan mencari atau

mengidentifikasi indikator-indikator kinerja dan menyusun sistem pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta melaporkannya ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Masyarakat menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang penuh terhadap manajemen pemerintah di daerah. Akuntabilitas tersebut menuntut agar pengelolaan berbagai program benar-benar efektif, tidak hanya *output* dari program saja, tetapi juga *outcome* atau bahkan dampak positif dari program itu harus dapat diwujudkan. Hal tersebut berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya serta melakukan pelayanan-pelayanan harus melalui indikator yang dapat diukur.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LAKIP ini. semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Maret 2018

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

H.M. YULISWAN, S.H, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19600205 198103 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Dasar Hukum	5
I.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	6
I.4. Gambaran Pelayanan Umum DPMD.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	47
3.2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.....	162
BAB IV PENUTUP	162
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diperlukan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang tepat, jelas dan terukur. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang

menggambarkan secara keseluruhan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. Sehingga secara keseluruhan menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1.3.1 Tujuan

1. Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan.
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termaksud penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat

5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

1.3.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

1.4 Gambaran Pelayanan Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berstruktur kerja sebagai berikut :

Fungsi pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

2.1.1 Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat, bidang pembangunan kawasan perdesaan, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. menyelenggarakan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat, bidang pembangunan kawasan perdesaan, serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA,

- RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - o. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
 - p. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengoordinasikan bidang-bidang.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta UPTD;
- h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA,

TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

m. memverifikasi kajian dan pertimbangan;

n. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

o. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.2.1 Subbagian Perencanaan

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta UPTD;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPD, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian

- perencanaan;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaserta UPTD;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
 - k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.2.2 Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;

- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:
- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
 - b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
 - c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
 - d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
 - f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
 - g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
 - h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - m. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.2.3 Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
 - g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:
 - a. merencanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
 - c. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - d. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
 - e. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - g. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan bahan pembinaan aparatur desa, petunjuk teknis, kebijakan Pemerintahan Desa/kelurahan, memfasilitasi penataan Desa, mengoordinasikan bantuan Keuangan Provinsi, evaluasi perkembangan Desa/kelurahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perencanaan dan program bidang pemerintahan Desa;
 - b. penyelenggaraan dan pengorganisasian tentang peraturan dan produk hukum;

- c. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan penataan desa, pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian rekapitulasi laporan keuangan desa dari kabupaten;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional di Bidang Pemerintahan Desa;
- b. mengoordinasikan pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. mengoordinasikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan bidang;
- d. mengoordinasikan dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan;
- e. memverifikasi rekapitulasi laporan realisasi keuangan Desa;
- f. mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan Desa;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis bantuan keuangan Provinsi;
- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengembangan kapasitas aparatur, penataan Desa dan kelembagaan masyarakat.
- i. mengevaluasi perkembangan Desa/Kelurahan;
- j. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja bidang pemerintahan desa;
- k. menghimpun peta wilayah Desa, statistik dan visualisasi Desa;

- l. menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.3.1 Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (1) Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan, melaksanakan, menilai dan melaporkan pelaksanaan kinerja di seksi penataan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai desa;
 - b. pelaksanaan perencanaan kegiatan berdasarkan rencana operasional di bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan perancangan kegiatan penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - d. pelaksanaan dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Uraian tugas Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
- a. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai desa;
 - b. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional di seksi penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. melaksanakan penyiapan bimbingan teknis tentang penyusunan peraturan desa, prosedur dan kriteria serta Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. mengoordinasikan tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan dan produk hukum desa;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam kegiatan bantuan keuangan Provinsi kepada pemerintahan desa;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengalokasian dana bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada pemerintahan desa/kelurahan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - h. melaporkan pelaksanaan kinerja di seksi penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

2.1.3.2 Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa

- (1) Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan, melaksanakan, menilai dan melaporkan pelaksanaan kinerja.
- (2) Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan operasional berdasarkan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan perencanaan kegiatan berdasarkan rencana operasional di bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan perancangan kegiatan aparatur dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
 - d. pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa meliputi:
 - a. menyusun kebijakan fasilitasi penilaian dan evaluasi hasil perkembangan desa/kelurahan;
 - b. merencanakan kegiatan seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan rencana operasional di Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembinaan melalui bimbingan teknis;
 - d. melaksanakan pemutakhiran data nama kepala desa, perangkat desa dan perangkat Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. melakukan pemantauan dan monitoring penyelenggaraan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - f. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan temu karya;
 - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

2.1.4 Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin, melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan desa.
- (2) Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, sosial dan budaya;
- c. penyelenggaraan dan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
- d. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kerja dan operasional di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan swadaya gotong royong masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga di pedesaan dan kelurahan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan pembinaan anak dan remaja, serta organisasi kepemudaan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar di desa dan kelurahan serta

Pembentukan dan pembinaan POKJANAL Posyandu secara berjenjang;

- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan fasilitasi sosial budaya masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- k. memfasilitasi pelaksanaan bantuan kepada masyarakat miskin pedesaan dan kelurahan;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha produksi perkreditan kepada masyarakat pedesaan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan serta peningkatan produksi pemasaran hasil usaha dan pendapatan asli masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- n. mengelola urusan ketatausahaan dan pendataan pengendalian perkembangan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;
- o. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan lembaga adat serta organisasi kepemudaan;
- p. mengoordinasi dan mengelola tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
- q. menilai prestasi kerja dan mempromosikan bawahan;
- r. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.4.1 Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, membina,

memonitoring dan mengevaluasi pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi desa dan kelurahan.

(2) Seksi Pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi desa dan kelurahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi dan pasar desa;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi meliputi:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha ekonomi;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi;
- d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi dan pemasaran hasil usaha desa dan kelurahan.
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan melalui bimbingan teknis;

- f. melaksanakan fasilitasi pemberian penguatan dan bantuan kepada masyarakat miskin.
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
 - h. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan pasar desa;
 - i. melaksanakan fasilitasi sinergi lintas sektor di bidang usaha ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan desa dan kelurahan;
 - j. melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan ketahanan pangan masyarakat desa dan Kelurahan;
 - k. mengevaluasi dan membina hasil kerja bawahan;
 - l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan;
 - m. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.4.2 Seksi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis fasilitasi sosial budaya Desa dan kelurahan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Seksi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan Sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - c. pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial budaya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
- a. merencanakan kegiatan seksi, sosial budaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - b. membimbing dan membagi tugas pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi sosial budaya Desa dan Kelurahan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), binaan 10 (sepuluh) program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pengembangan peranan wanita;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan partisipasi perempuan;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan peran serta masyarakat dan pemantapan

kelembagaan pengarusutamaan gender desa dan kelurahan;

- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan perlindungan anak dan remaja.
- g. melaksanakan peningkatan fasilitasi pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) di masing-masing daerah;
- h. melaksanakan pembinaan, sinergi lintas sektor dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan sinergi lintas sektor;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di seksi-seksi sosial budaya dan pemberdayaan desa dan kelurahan;
- k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.5 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat

- (1) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam , Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, memverifikasi, mendistribusikan, mengoordinasi, mengevaluasi, dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, kebijakan dan operasionalisasi pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;
- b. penyelenggaraandan pengoordinasian pelaksanaan pendistribusian tugas ke bawahan sesuai tugas pokoknya;
- c. penyelenggaraandan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat meliputi:

- a) mengoordinasikan penyusunan rencana Kerja dan operasional;
- b) mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- d) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- e) memverifikasi pelaksanaan pengkajian pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;
- f) memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kerjasama pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;

- g) memfasilitasi pemanfaatan dan pemberian bantuan serta pemasyarakatan teknologi tepat guna;
 - h) mengoordinasikan pengelolaan tugas perbantuan dan Dana Dekonsentrasi.
 - i) Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - j) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.5.1 Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

- (1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memimpin dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan, analisis, pemanfaatan, pendataan sumber daya alam, teknologi tepat.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan di Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pembagian tugas bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- c. pelaksanaan perancangan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - e. pelaksanaan pengkajian ulangkegiatan di Seksi Pendayagunaan sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna meliputi:
- a. merencanakan kegiatan seksi Pendayagunaan sumber daya Alam, Teknologi Tepat Guna;
 - b. menentukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. mengkaji ulang pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. merancang dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi tepat guna;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya pesisir, wilayah maritim, perbatasan desa dan kelurahan kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendataan dan pemetaan sumber daya alam, pesisir, pantai dan daratan desa dan kelurahan;
 - g. mengembangkan, memanfaatkan, dan mensosialisasikan teknologi tepat guna masyarakat desa dan kelurahan;
 - h. menganalisis dan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan fasilitasi teknologi tepat guna desa dan kelurahan;

- i. mengkaji ulang pelaksanaan kegiatan;
 - j. membuat konsep laporan pelaksanaan kinerja;
 - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat.

2.1.5.2 Seksi Pelatihan Masyarakat

- (1) Seksi Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan Pelatihan masyarakat melalui pembinaan, pengembangan, perencanaan, penyiapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat.
- (2) Seksi pelatihan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelatihan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan pemberdayaan dan pelatihan masyarakat ;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat.
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat;

- f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pelatihan Masyarakat meliputi:
- a. merencanakan kegiatan seksi Pelatihan Masyarakat;
 - b. menentukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan pelatihan masyarakat ;
 - d. melaksanakan pelatihan masyarakat;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di seksi Pelatihan masyarakat;
 - f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat.

2.1.6 Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

- (1) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasi, memfasilitasi, mengawas, membina, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perencanaan program pembangunan kawasan perdesaan;

- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana Kerja dan operasional;
 - b. mengoordinasikan dan mengoordinasikan tugas kepada bawahan;
 - c. merumuskan dan memverifikasikan kebijakan pembangunan sarana prasarana dan ekonomi kawasan perdesaan;
 - d. mengoordinasikan pengembangan kapasitas;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - f. memprogramkan, mengelola Dana Dekonsentrasi;
 - g. merumuskan kebijakan draf Kerjasama pembangunan kapasitas kawasan perdesaan;
 - h. mengoordinasikan kerjasama antar desa, lembaga Pemerintah dan non pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media pembelajaran, kerjasama kemitraan dan keserasian kawasan perdesaan;

- i. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Kerjasama pembangunan kapasitas kawasan perdesaan;
 - j. menganalisa pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi serta Kerjasama pembangunan kapasitas kawasan perdesaan;
 - k. menganalisa evaluasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan kawasan perdesaan;
 - l. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.6.1 Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

- (1) Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, membina, memonitoring dan mengevaluasi pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan bahan perumusan pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan verifikasi kebijakan pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengembangan kapasitas dalam rangka pendampingan manajemen teknis dan penyiapan media pembelajaran, kerjasama kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan,
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. merencanakan kegiatan di Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana kawasan perdesaan;
 - b. merancang penyiapan bahan perumusan Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana kawasan perdesaan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis bidang pembangunan ekonomi, Sarana dan Prasarana kawasan perdesaan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan pasar kawasan perdesaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

g. membagi tugas dan membimbing pelaksanaan tugas bawahan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.1.6.2 Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kawasan perdesaan

- (1) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kawasan perdesaan mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, membina, memonitoring, mengevaluasi kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan bahan perumusan kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengembangan kapasitas;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;

- f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, media pembelajaran kerjasama kemitraan dan keserasian kawasan perdesaan.
- d. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa, lembaga Pemerintah dan non pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. melaksanakan fasilitasi pendampingan manajemen dan teknis kerjasama dan pengembangan kapasitas perdesaan;
- f. menganalisa pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi serta kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
- g. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi pada Kabupaten/Kota;
- h. menganalisis evaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan;

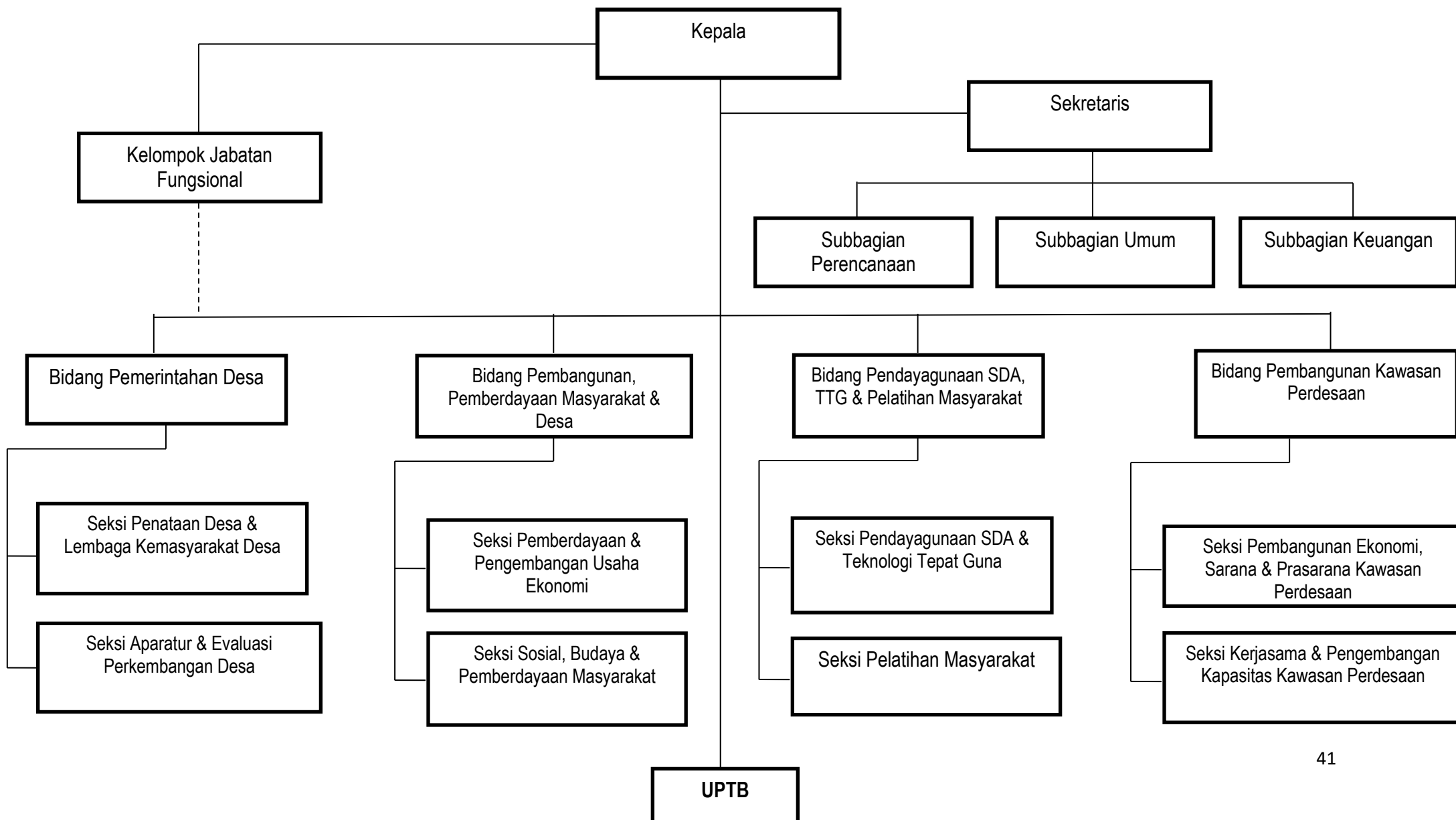
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.1.7 JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



1.4.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

Dalam hal sarana dan prasarana atau asset yang dimiliki di Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki asset sebagai berikut :

A.	ASET TETAP	
	Tanah	26.154.135,00
	Peralatan dan Mesin	1.618.989.173,00
	Gedung dan Bangunan	2.002.685.320,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.600.000,00
	Aset tetap lainnya	28.350.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.768.828.487,00)
	Jumlah Aset Tetap	1.954.941.141,00
B.	ASET LAINNYA	
	Aset Lain-lain	221.561.724,00
	Jumlah Aset Lainnya	221.561.724,00
	JUMLAH ASET SELURUH	2.179.645.465,00

(data terlampir)

Untuk sumber daya manusia, urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2017 didukung oleh Pegawai sebanyak 51 pegawai dengan status kepegawaian 50 PNS, 1 CPNS.

Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S3 0 Orang, S2 7 Orang, S1 32 Orang, D3 4 Orang, SLTA 8 Orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari : Golongan IV sebanyak 8 Orang, Golongan III sebanyak 34 Orang, Golongan II sebanyak 9 Orang. Berdasarkan eselonering, yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 5 Orang, dan Eselon IV

sebanyak 11 Orang. Sedangkan untuk tenaga honorer adalah sebanyak 30 Orang.

Klasifikasi Pegawai
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Doktoral/S3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana/S2	6	1	7
3.	Sarjana/S1	23	9	32
4.	Diploma IV	-	-	-
5.	Diploma III	3	1	4
6.	Diploma I/II	-	-	-
7.	SLTA	6	2	8
8.	SLTP	-	-	-
9.	SD	-	-	-
JUMLAH		38	13	51

Klasifikasi Pegawai
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eselonering

No	Tingkat Eselonering	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	II A	1	-	1
2.	II B	-	-	-
3.	III A	5	-	5
4.	III B	-	-	-
5.	IV A	9	2	11
6.	IV B	-	-	-
7.	Non Eselon	21	9	30
8.	Fungsional	1	3	4
JUMLAH				51

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk Penetapan Kinerja 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan review terhadap sasaran, indikator dan target kinerja tahun 2017, dikarenakan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan sebelumnya belum memenuhi kriteria spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevance*), dan memiliki batasan waktu (*time-bound*).

Adapun review terhadap penetapan kinerja 2017 tersebut tentunya diselaraskan atau disesuaikan dengan rencana strategis 2012-2017 yang juga telah dilakukan review atau perubahan.

Dalam rencana strategis ataupun dalam penetapan kinerja 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 5 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dalam penetapan kinerja tahun 2017 telah ditetapkan sasaran indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa, dengan indikator :

1. Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDDes, RPJMDes, APBDDes ditargetkan sebanyak 100%.
2. Presentase Desa yang difasilitasi dengan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa atau Kelurahan yang Mengaplikasikannyaditargetkan sebanyak 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator :

1. Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif ditargetkan sebanyak 100%.
2. Persentase desa/Kelurahan yang sudah mempunyai Profil Desa/Kelurahan ditargetkan sebanyak 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, dengan indikator :

1. Persentase PKK aktif ditargetkan sebanyak 100%.
2. Persentase posyandu aktif ditargetkan sebanyak 100%.
3. Jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-ASdi daerah tertinggal dan terpencil ditargetkan sebanyak 2450 Siswa.

Sasaran 4 : Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dengan indikator :

1. Persentase Bumdes yang terbentuk dan aktif ditargetkan sebanyak 6 Bumdes.
2. Jumlah Pasar desa yang aktif ditargetkan sebanyak 12 Pasar Desa.
3. Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis ditargetkan sebanyak 100 % (43.018 RTS-PM).

Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dengan indikator :

1. Jumlah Posyantek yang berfungsi ditargetkan sebanyak 25 Pos TTG.
2. Persentase Desa yang mengelola Sumber Daya Alam dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna ditargetkan sebanyak 100%.

Selanjutnya untuk penetapan kinerja 2017 selengkapnya dapat dalam tabel. (data terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017**

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemeritah Desa/Kelurahan yang Mengaplikasikannya	5%	15%	20%	10%	100%	5%	15%	20%	10%	100%	1	1	1	1	1
2.	Persentase Desa yang difasilitasi dengan Pengelolaan Keuangan Desa atau Kelurahan yang Mengaplikasikannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

3.	Persentase Aparatur Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif dalam Pembangunan Partisipatif	10%	10%	5%	10%	100%	10%	10%	5%	10%	100%	1	1	1	1	1
4.	Persentase Desa/Kelurahan yang sudah Mempunyai Profil Desa/Kelurahan	4%	20%	15%	5%	100%	4%	20%	15%	5%	100%	1	1	1	1	1
	Jumlah Desa/Kelurahan yang berkriteria baik dalam partisipasi terhadap pembangunan Desa/Kelurahan.	6%	6%	6%	-	-	6%	6%	6%	-	-	1	1	1	-	-
5.	Persentase BUMDes yang telah terbentuk dan aktif	10%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	1	1	1	1	1
6.	Jumlah Pasar Desa yang	5	5	18	10	12	5	5	18	10	12	5	5	18	10	12

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

	telah terbentuk dan aktif															
7.	Persentase TP.PKK Desa/Kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
8.	Persentase Posyandu Desa/Kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
9.	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang terfasilitasi dalam Program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil	2000	2499	2550	2600	2450	2.916	2.499	2550	2600	2450	1.45	1.0	1.0	1.0	1.0
	Persentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/Usaha Ekonomi Produktif	10%	10%	-	-	-	10%	10%	-	-	-	1	1	-	-	-
10.	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkatnya semangat kegotong	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	1	1	1	-	-

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

	royongan melalui fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat.																
11.	Jumlah Posyantek yang berfungsi	15	17	20	23	25	15	17	20	23	25	0,5	1	1	1	1	1
12.	Persentase Desa yang Mengembangkan Energi Baru Terbarukan	10%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Persentase Desa yang Mengelola SDA dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna	5%	10%	20%	5%	100%	5%	10%	20%	5%	100%	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pemasyarakatan dan kerjasama TTG melalui	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	1	1	1	1	1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

	pelatihan/bimtek posyantekdes, pelaksanaan gelar TTG, koordinasi dan lomba TTG.																
	Jumlah Pokja di desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA melalui pelatihan, Rakor, Workshop dan Supervisi.	5	13	13	13	13	5	13	13	-	-	1	1	1	-	-	
14.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Raskintis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	
15.	Jumlah desa yang responsif terhadap kepedulian kepada masyarakat miskin melalui swasembada beras.	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	

Tabel
Pengukuran Kinerja tahun 2017

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa	1)	Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDDes.	100%
		2)	Presentase Desa yang difasilitasi dengan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa atau Kelurahan yang Mengaplikasikannya.	100%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	1)	Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif.	100%
		2)	Persentase desa/Kelurahan yang sudah mempunyai	100%

			Profil Desa/Kelurahan.	
3.	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	1)	Persentase PKK aktif.	100%
		2)	Persentase Posyandu aktif.	100%
		3)	Jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-ASdi daerah tertinggal dan terpencil	2450 Siswa
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	1)	Persentase Bumdes yang terbentuk dan aktif.	6 Bumdes.
		2)	Jumlah Pasar desa yang aktif.	12 Pasar Desa
		3)	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis.	100 % (43.018 RTS-PM)
5.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1)	Jumlah Posyantek yang berfungsi.	25 Pos TTG

		3)	Persentase Desa yang mengelola Sumber Daya Alam dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna.	100%
--	--	----	---	------

Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa

Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa digunakanlah indikator sebagai berikut:

1. Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDDes ditargetkan sebanyak 100%.
2. Presentase Desa yang difasilitasi dengan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa atau Kelurahan yang Mengaplikasikannya ditargetkan sebanyak 100%.

Tabel Jumlah aparatur desa
yang mampu menyusun peraturan desa Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1) Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes,	100%	100%	100%

APBDes.			
2) Presentase Desa yang difasilitasi dengan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa atau Kelurahan yang Mengaplikasikannya.	100%	100%	100%

Pada table diatas dapat dilihat bahwa Target jumlah desa yang mampu dalam pengelolaan keuangan dan asset Desa atau Kelurahan yang mengaplikasikannya pada tahun 2017 mencapai 100%, yang terealisasi adalah 100% capaian 100% dan dikategorikan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagian besar desa telah terdapat Peraturan Desa (Perdes) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa seperti : Perdes tentang administrasi dan keuangan desa, perdes tentang pelaksanaan APBDes, Perdes tentang pemilihan ketua dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Perdes tentang Bumdes, pasar desa dan lain-lain.

Pada tahun 2017 untuk indikator “realisasi jumlah aparatur desa yang mampu menyusun peraturan desa mencapai 100% dari target 100% dan terealisasi 100%.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator ini antara lain memberikan pelatihan dan bimtek mengenai penyusunan peraturan desa kepada aparatur desa dan Pelaporan Administrasi Keuangan, mengadvokasi aparatur desa dalam pendampingan dan penguasaan pembuatan peraturan desa.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

Untuk mengukur kualitas kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa digunakanlah indikator sebagai berikut:

1. Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif ditargetkan sebanyak 100%.
2. Persentase desa/Kelurahan yang sudah mempunyai Profil Desa/Kelurahan ditargetkan sebanyak 100%.

Jumlah desa dan kelurahan yang berkriteria baik dalam partisipasi terhadap pembangunan desa dan kelurahan Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah desa dan kelurahan yang berkriteria baik dalam partisipasi terhadap pembangunan desa dan kelurahan	6 desa dan kelurahan	6 desa dan kelurahan	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi jumlah desa dan kelurahan yang berkriteria baik dalam partisipasi terhadap pembangunan desa dan kelurahan adalah 6 desa dan kelurahan hal ini sesuai dengan target dan bertujuan untuk memotivasi aparatur desa agar dapat menata lebih baik dari segala aspek :

Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Keamanan dan Partisipasi PKK dalam rangka mendukung program nasional Kementerian dalam Negeri.

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 di dapat 3 desa dan 3 kelurahan yang menjadi pemenang yaitu: Pemenang I, Desa Buding kabupaten Belitung Timur dan Kelurahan Sungai Selan Bangka Tengah. Pemenang II, Desa Keretak Kabupaten Bangka Tengah dan Kelurahan Sri Menenti Kabupaten Bangka. Pemenang III, Desa Karya Makmur Kabupaten Bangka dan Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Pangkalpinang.

Tabel Persentase desa
yang sudah mempunyai profil Desa/Kelurahan
dan pembangunan desa Tahun 2017

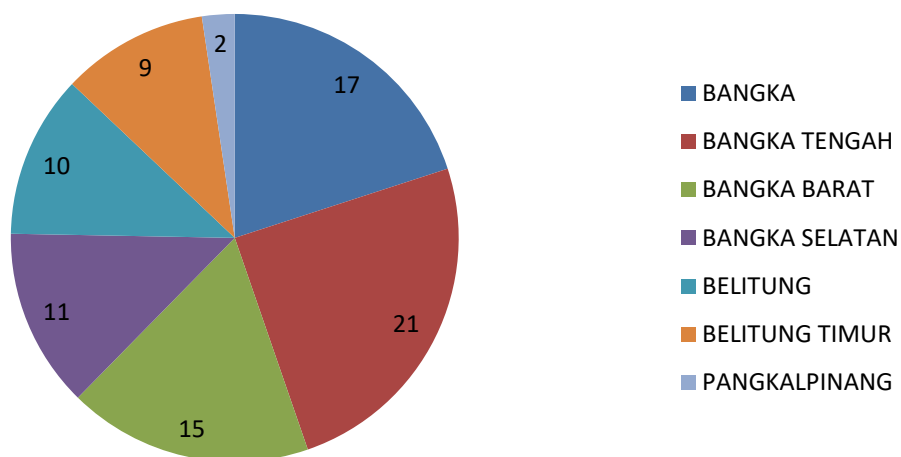
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1) Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif.	100%	100%	100%
2) Persentase desa/Kelurahan yang sudah mempunyai Profil Desa/Kelurahan.	100%	100%	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Indikator Jumlah desa yang sudah mempunyai RPJMDes/ RKPDes untuk pembangunan desa mencapai 100% artinya dari jumlah desa yang

ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempunyai RPJMDes dan RKPDes. Pada Tahun berjalan pelaksanaan untuk capaian indikator kinerja desa yang sudah mempunyai RPJMDes dan RKPDes untuk pembangunan Desa tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator ini tidak mengalami kenaikan.

Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari usaha Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bagi SDM desa/ kelurahan melalui Pelatihan/ Bimtek mengenai cara menyusun dan membuat RPJMDes sesuai dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007.

Tabel Capaian profil desa/ kelurahan



Pada tahun 2014 tercapai 34,66% artinya dari 375 desa/kelurahan yang sudah mempunyai profil desa sebanyak 130 desa/ kelurahan dan tahun 2015 tercapai 62,90% artinya dari 375 desa/ kelurahan baru terdapat 236 desa/ kelurahan. Di tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 6,09%. Dan tahun

2017 terjadi peningkatan sebesar 22,66% dibanding tahun sebelumnya.

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Kurangnya tenaga operator untuk menginput data desa/kelurahan
2. Tidak semua desa/ kelurahan yang terjangkau oleh sinyal internet.

Untuk mendukung upaya peningkatan pencapaian indikator tersebut adalah Melakukan monitoring, evaluasi dan pelatihan kepada seluruh desa/ kelurahan yang ada di provinsi kepulauan Bangka Belitung.

1. Memberikan pembinaan kepada seluruh desa/ kelurahan mengenai cara penyusunan profil desa/ kelurahan baik secara manual maupun online.
2. Memberikan fasilitas yang baik kepada desa contohnya adanya jaringan website yang baik di daerah yang tidak terjangkau

Memberikan reward dalam penginputan data kepada tenaga pelaksana di desa/ kelurahan yang baik.

Pada tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa Indikator Persentase desa yang sudah mempunyai profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa mencapai 22,66% artinya dari 387 desa dan kelurahan yang ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terdapat 85 desa/ kelurahan yang mempunyai profil desa/ kelurahan yaitu : Kabupaten Bangka 17 desa/ kelurahan, Kabupaten Bangka Tengah 21 desa/ kelurahan, Kabupaten Bangka Barat 15 desa/kelurahan, Kabupaten Bangka Selatan 11 desa/ kelurahan,

Belitung 10 desa/ kelurahan, Kabupaten Belitung Timur 9 desa/ kelurahan dan Kota Pangkalpinang 2 desa/ kelurahan. (data terlampir)

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.

Untuk mengukur kualitas pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat digunakanlah indikator sebagai berikut:

1. Persentase PKK aktif ditargetkan sebanyak 100%.
2. Persentase posyandu aktif ditargetkan sebanyak 100%.
3. Jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil ditargetkan sebanyak 2450 Siswa.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1) Persentase PKK aktif	100%	100%	100%
2) Persentase posyandu aktif	100%	100%	100%
3) Jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil	2450 siswa	2600 siswa	2600 siswa

JUMLAH PKK AKTIF TAHUN 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah persentase PKK aktif	100%	100%	100%

DATA PKK DI DESA YANG AKTIF SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

NO.	KABUPATEN	NAMA KECAMATAN		NAMA DESA	
1	2	3		4	
1	Bangka	8	Kecamatan	62	Desa
		1	Sungailiat	1	Desa
				1	Rebo
		2	Belinyu	5	Desa
				1	Gunung Muda
				2	Gunung Pelawan
				3	Riding Panjang
				4	Lumut
				5	Bintet
		3	Merawang	10	Desa
				1	Batu Rusa
				2	Balunijuk
				3	Riding Panjang
				4	Jurung
				5	Kimak
				6	Pagarawan
				7	Merawang
				8	Air Anyir
				9	Dwi Makmur
				10	Jadah Bahrin

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

		4	Mendo Barat	15	Desa
				1	Petaling
				2	Penagan
				3	Zed
				4	Mendo
				5	Paya Benua
				6	Cengkong Abang
				7	Kace
				8	Kemuja
				9	Air Duren
				10	Kota Kapur
				11	Air Buluh
				12	Rukam
				13	Labuh Air Pandan
				14	Kace Timur
				15	Petaling Banjar
		5	Pemali	6	Desa
				1	Air Ruai
				2	Air Duren
				3	Penyamun
				4	Sempan
				5	Pemali
				6	Karya Makmur
		6	Bakam	9	Desa
				1	Bakam
				2	Kapuk
				3	Dalil
				4	Neknang
				5	Tiang Tarah
				6	Mangka
				7	Mabat
				8	Bukit Layang
				9	Maras Senang
		7	Riau Silip	9	Desa
				1	Riau

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				2	Pangkal Niur
				3	Pugul
				4	Cit
				5	Deniang
				6	Silip
				7	Mapur
				8	Banyu Asin
				9	Berbura
		8	Puding Besar	7	Desa
				1	Puding Besar
				2	Labu
				3	Nibung
				4	Tanah Bawah
				5	Saing
				6	Kota Waringin
				7	Kayu Besi
2	Belitung	5	Kecamatan	42	Desa
		1	Tanjung Pandan	9	Desa
				1	Buluh Tumbang
				2	Perawas
				3	Dukong
				4	Juru Sebrang
				5	Air Saga
				6	Air Merbau
				7	Aik Rayak
				8	Aik Pelempang Jaya
				9	Aik Ketekok
		2	Membalong	12	Desa
				1	Membalong
				2	Perpat
				3	Lassar
				4	Simpang Rusa
				5	Kembiri
				6	Bantan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				7	Tanjung Rusa
				8	Mentigi
				9	Pulau Seliu
				10	Pulau Sumedang
				11	Gunung Riting
				12	Padang Kandis
		3	Selat Nasik	4	Desa
				1	Selat Nasik
				2	Petaling
				3	Suak Gual
				4	Pulau Gersik
		4	Sijuk	10	Desa
				1	Sijuk
				2	Batu Itam
				3	Terong
				4	Air Seruk
				5	Tanjung Binga
				6	Air Selumar
				7	Sungai Padang
				8	Keciput
				9	Pelepak Pute
				10	Tanjong Tinggi
		5	Badau	7	Desa
				1	Badau
				2	Air Batu Buding
				3	Sungai Samak
				4	Kacang Butor
				5	Cerucuk
				6	Pegantungan
				7	Ibul
3	Bangka Selatan	8	Kecamatan	50	Desa
		1	Toboali	8	Desa
				1	Serdang
				2	Jeriji
				3	Bikang

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				4	Gadung
				5	Rias
				6	Kepoh
				7	Keposang
				8	Rindik
		2	Lepar Pongok	3	Desa
				1	Tanjung Labu
				2	Tanjung Sangkar
				3	Kumbung
				4	Penutuk
		3	Pongok	3	Desa
				1	Pongok
				2	Celagen
		4	Air Gegas	10	Desa
				1	Air Gegas
				2	Delas
				3	Pergam
				4	Bencah
				5	Nyelanding
				6	Nangka
				7	Ranggas
				8	Air Bara
				9	Sidoharjo
				10	Tepus
		5	Simpang Rimba	7	Desa
				1	Jelutung II
				2	Gudang
				3	Bangka Kota
				4	Rajik
				5	Sebagin
				6	Simpang Rimba
				7	Permis
		6	Payung	9	Desa
				1	Payung

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				2	Malik
				3	Sengir
				4	Pangkal Buluh
				5	Irat
				6	Bedengung
				7	Nadung
				8	Ranggung
				9	Paku
		7	Tukak Sadai	5	Desa
				1	Tukak
				2	Sadai
				3	Pasir Putih
				4	Tiram
				5	Bukit Terap
		8	Pulau Besar	5	Desa
				1	Batu Betumpang
				2	Suka Jaya
				3	Panca Tunggal
				4	Fajar Indah
				5	Sumber Jaya Permai
4	Bangka Tengah	6	Kecamatan	56	Desa
		1	Koba	6	Desa
				1	Nibung
				2	Guntung
				3	Terentang
				4	Penyak
				5	Kurau Barat
				6	Kurau Timur
		2	Pangkalan Baru	11	Desa
				1	Tanjung Gunung
				2	Benteng
				3	Air Mesu
				4	Beluluk
				5	Mangkol

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				6	Padang Baru
				7	Jeruk
				8	Pedindang
				9	Batu Belubang
				10	Kebintik
				11	Air Mesu Timur
		3	Sungai Selan	12	Desa
				1	Sungai Selan Atas
				2	Lampur
				3	Keretak
				4	Sarang Mandi
				5	Kerantai
				6	Munggu
				7	Kemingking
				8	Kerakas
				9	Romadhon
				10	Tanjung Pura
				11	Melabun
				12	Keretak Atas
		4	Simpang Katis	10	Desa
				1	Simpang Katis
				2	Sungkap
				3	Celuak
				4	Puput
				5	Beruas
				6	Teru
				7	Terak
				8	Pasir Garam
				9	Katis
				10	Pinang Sebatang
		5	Namang	8	Desa
				1	Cambai
				2	Jelutung
				3	Namang
				4	Belilik

				5	Kayu Besi
				6	Baskara Bhakti
				7	Bukit Kijang
				8	Cambai Selatan
		6	Lubuk Besar	9	Desa
				1	Lubuk besar
				2	Lubuk Pabrik
				3	Lubuk Lingkok
				4	Batu Beriga
				5	Perlang
				6	Kulur
				7	Trubus
				8	Kulur Ilir
				9	Belimbing
5	Bangka Barat	6	Kecamatan	60	Desa
		1	Mentok	4	Desa
				1	Air Putih
				2	Air Belo
				3	Belo Laut
				4	Air Limau
		2	Simpang Teritip	13	Desa
				1	Pelangas
				2	Kundi
				3	Mayang
				4	Peradong
				5	Air Nyatoh
				6	Berang
				7	Desa Rambat
				8	Desa Simpang Gong
				9	Desa Simpang Tiga
				10	Desa Ibul
				11	Pangek
				12	Bukit Terak
				13	Air Menduyung

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

		3	Jebus	11	Desa
				1	Jebus
				2	Sungai Buluh
				3	Tumbak/Petar
				4	Limbung
				5	Rukam
				6	Ranggi/Asam
				7	Ketap
				8	Mislak
				9	Pebuar
				10	Sinar manik
				11	Air Kuang
		4	Kelapa	13	Desa
				1	Mancung
				2	Kayu Arang
				3	Pusuk
				4	Dendang
				5	Kacung
				6	Sinar Sari
				7	Beruas
				8	Tebing
				9	Terentang
				10	Tuik
				11	Tugang
				12	Air Bulin
				13	Pangkal Beras
		5	Tempilang	9	Desa
				1	Tempilang
				2	Tanjung Niur
				3	Sangku
				4	Buyan Kelumbi
				5	Penyampak
				6	Benteng Kota
				7	Air Lintang
				8	Sinar Surya

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				9	Simpang Yul
		6	Parit Tiga	10	Desa
				1	Bakit
				2	Semulut
				3	Puput
				4	Teluk Limau
				5	Kapit
				6	Kelabat
				7	Air Gantang
				8	Sekar Biru
				9	Cupat
				10	Telak
6	Belitung Timur	7	Kecamatan	39	Desa
		1	Manggar	9	Desa
				1	Lalang Jaya
				2	Kurnia Jaya
				3	Padang
				4	Kelubi
				5	Lalang
				6	Baru
				7	Buku Limau
				8	Mekar Jaya
				9	Bentaian Jaya
		2	Gantung	7	Desa
				1	Gantung
				2	Selinsing
				3	Jangkar Asam
				4	Lilangan
				5	Lenggang
				6	Batu Penyu
				7	Limbongan
		3	Dendang	4	Desa
				1	Dendang
				2	Jangkang
				3	Nyuruk

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				4	Balok
		4	Kelapa Kampit	6	Desa
				1	Mentawak
				2	Senyubuk
				3	Cendil
				4	Buding
				5	Mayang
				6	Pembaharuan
		5	Damar	5	Desa
				1	Air Kelik
				2	Mempayak
				3	Burong Mandi
				4	Mengkubang
				5	Sukamandi
		6	Simpang Renggiang	4	Desa
				1	Simpang Tiga
				2	Renggiang
				3	Aik Madu
				4	Lintang
		7	Simpang Pesak	4	Desa
				1	Simpang Pesak
				2	Tanjung Batu Hitam
				3	Tanjung Kelumpang
				4	Dukong
JUMLAH TOTAL		40	Kecamatan	309	Desa

DATA PKK KELURAHAN YANG AKTIF TAHUN 2017

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan		KELURAHAN	
1	2	3		4	
1	Bangka	2	Kecamatan	1	Kelurahan
		1	Sungailiat	2	Kelurahan
				1	Sungailiat
				2	Sri Menanti
				3	Kudai
				4	Sinar Baru
				5	Kenanga
				6	Parit Padang
				7	Sinar jaya Jelutung
				8	Matras
				9	Jelitik
				10	Surya Timur
				11	Lubuk Kelik
				12	Bukit Betung
		2	Belinyu	7	Kelurahan
				1	Kuto Panji
				2	Air Jukung
				3	Bukit Ketok
				4	Mantung
				5	Belinyu
				6	Air asam
				7	Remodong
2	Belitung	1	Kecamatan	7	Kelurahan
		1	Tanjung Pandan	7	Kelurahan
				1	Kota
				2	Parit

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				3	Paal Satu
				4	Pangkal Lalang
				5	Lesung Batang
				6	Tanjung Pendam
				7	Kampung Damai
3	Bangka Selatan	1	Kecamatan	3	Kelurahan
		1	Toboali	3	Kelurahan
				1	Toboali
				2	Teladan
				3	Tanjung Ketapang
4	Bangka Tengah	3	Kecamatan	7	Kelurahan
		1	Koba	5	Kelurahan
				1	Koba
				2	Simpang Perlang
				3	Berok
				4	Padang Mulia
				5	Arung Dalam
		2	Pangkalan Baru	1	Kelurahan
				1	Dul
		3	Sungai Selan	1	Kelurahan
				1	Sungai selan
5	Bangka Barat	2	Kecamatan	4	Kelurahan
		1	Mentok	3	Kelurahan
				1	Tanjung
				2	Sungai Daeng
				3	Sungai Baru
		2	Kelapa	1	Kelurahan
				1	Kelapa
6	Pangkalpinang	7	Kecamatan	4	Kelurahan
		1	Bukit Intan	7	Kelurahan
				1	Pasir Putih
				2	Sinar Bulan
				3	Temberan
				4	Semabung Lama

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				5	Air Mawar
				6	Bacang
				7	Air Itam
		2	Girimaya	5	Kelurahan
				1	Batu Intan
				2	Bukit Besar
				3	Semabung Baru
				4	Sriwijaya
				5	Pasar Padi
		3	Taman Sari	5	Kelurahan
				1	Opas Indah
				2	Gedung Nasional
				3	Batin Tikal
				4	Rawa Bangun
				5	Kejaksaan
		4	Pangkal Balam	5	Kelurahan
				1	Pasir Garam
				2	Lontong Pancur
				3	Ketapang
				4	Ampui
				5	Rejo Sari
		5	Rangkui	8	Kelurahan
				1	Pintu Air
				2	Bintang
				3	Gajah Mada
				4	Masjid Jamik
				5	Asam
				6	Melintang
				7	Parit Lalang
				8	Keramat
		6	Gerunggang	6	Kelurahan
				1	Taman Bunga
				2	Bukit Merapin
				3	Air Kelapa Tujuh
				4	Bukit Sari

				5	Tua Tunu
				6	Kacang Pedang
		7	Gabek	6	Kelurahan
				1	Gabek Satu
				2	Gabek Dua
				3	Selindung Baru
				4	Air Salemba
				5	Selindung
				6	Jerambah Gantung
JUMLAH TOTAL				8 2	Kelurahan

Jumlah Posyandu yang aktif Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%

DATA POSYANDU AKTIF

SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

DESA		POSYANDU
1		2
62		
1	Desa	POSYANDU
1	Rebo	ada 2
5	Desa	
1	Gunung Muda	Ada
2	Gunung Pelawan	Ada

3	Riding Panjang	Ada
4	Lumut	Ada
5	Bintet	ada
10	Desa	POSYANDU
1	Batu Rusa	Ada
2	Balunijuk	Ada
3	Riding Panjang	Ada
4	Jurung	Ada
5	Kimak	Ada
6	Pagarawan	Ada
7	Merawang	Ada
8	Air Anyir	Ada
9	Dwi Makmur	ada
10	Jadah Bahrin	ada
9	Desa	POSYANDU
1	Riau	Ada
2	Pangkal Niur	Ada
3	Pugul	Ada
4	Cit	Ada
5	Deniang	Ada
6	Silip	Ada
7	Mapur	Ada
8	Banyu Asin	Ada
9	Berbura	ada
7	Desa	POSYANDU
1	Puding Besar	Ada
2	Labu	ada
3	Nibung	Ada
4	Tanah Bawah	Ada

5	Saing	Ada
6	Kota Waringin	ada
7	Kayu Besi	Ada
42	Desa	
9	Desa	POSYANDU
1	Buluh Tumbang	Ada
2	Perawas	Ada
3	Dukong	Ada
4	Juru Sebrang	Ada
5	Air Saga	Ada
6	Air Merbau	Ada
7	Aik Rayak	Ada
8	Aik Pelempang Jaya	Ada
9	Aik Ketekok	Ada
		Ada
12	Desa	POSYANDU
1	Membalong	Ada
2	Perpat	Ada
3	Lassar	Ada
4	Simpang Rusa	Ada
5	Kembiri	Ada
6	Bantan	Ada
7	Tanjung Rusa	Ada
8	Mentigi	Ada
9	Pulau Seliau	Ada
10	Pulau Sumedang	Ada
11	Gunung Riting	Ada
12	Padang Kandis	Ada
10	Desa	POSYANDU

1	Sijuk	Ada
2	Batu Itam	Ada
3	Terong	Ada
4	Air Seruk	Ada
5	Tanjung Binga	Ada
6	Air Selumar	Ada
7	Sungai Padang	Ada
8	Keciput	Ada
9	Pelepak Pute	Ada
10	Tanjong Tinggi	Ada
7	Desa	POSYANDU
1	Badau	Ada
2	Air Batu Buding	Ada
3	Sungai Samak	Ada
4	Kacang Butor	Ada
5	Cerucuk	Ada
6	Pegantungan	Ada
7	Ibul	Ada
50	Desa	POSYANDU
8	Desa	
1	Serdang	Ada
2	Jeriji	Ada
3	Bikang	Ada
4	Gadung	ada
5	Rias	Ada
6	Kepoh	Ada
7	Keposang	ada
8	Rindik	Ada
3	Desa	POSYANDU

1	Tanjung Labu	Ada
2	Tanjung Sangkar	Ada
3	Kumbung	Ada
4	Penutuk	Ada
3	Desa	POSYANDU
1	Pongok	Ada
2	Celagen	Ada
10	Desa	POSYANDU
1	Air Gegas	ada
2	Delas	Ada
3	Pergam	Ada
4	Bencah	Ada
5	Nyelanding	ada
6	Nangka	Ada
7	Ranggas	Ada
8	Air Bara	Ada
9	Sidoharjo	Ada
10	Tepus	Ada
7	Desa	POSYANDU
1	Jelutung II	ada
2	Gudang	ada
3	Bangka Kota	Ada
4	Rajik	Ada
5	Sebagin	Ada
6	Simpang Rimba	Ada
7	Permis	ada
9	Desa	POSYANDU
1	Payung	ada
2	Malik	Ada

3	Sengir	ada
4	Pangkal Buluh	Ada
5	Irat	Ada
6	Bedengung	ada
7	Nadung	Ada
8	Ranggung	Ada
9	Paku	ada
5	Desa	POSYANDU
1	Tukak	Ada
2	Sadai	Ada
3	Pasir Putih	Ada
4	Tiram	Ada
5	Bukit Terap	Ada
5	Desa	POSYANDU
1	Batu Betumpang	Ada
2	Suka Jaya	Ada
3	Panca Tunggal	Ada
4	Fajar Indah	Ada
5	Sumber Jaya Permai	Ada
56	Desa	
6	Desa	POSYANDU
1	Nibung	ada
2	Guntung	Ada
3	Terentang III	ada
4	Penyak	ada
5	Kurau Barat	Ada
6	Kurau	ada
11	Desa	POSYANDU
1	Tanjung Gunung	Ada

2	Benteng	Ada
3	Air Mesu	Ada
4	Beluluk	Ada
5	Mangkol	Ada
6	Padang Baru	Ada
7	Jeruk	Ada
8	Pedindang	Ada
9	Batu Belubang	Ada
10	Kebintik	Ada
11	Air Mesu Timur	Ada
12	Desa	POSYANDU
1	Sungai Selan Atas	Ada
2	Lampur	Ada
3	Keretak	Ada
4	Sarang Mandi	Ada
5	Kerantai	ada
6	Munggu	ada
7	Kemingking	Ada
8	Kerakas	Ada
9	Romadhon	ada
10	Tanjung Pura	Ada
11	Melabun	Ada
12	Keretak Atas	Ada
10	Desa	POSYANDU
1	Simpang Katis	Ada
2	Sungkap	Ada
3	Celuak	Ada
4	Puput	Ada
5	Beruas	Ada

6	Teru	Ada
7	Terak	Ada
8	Pasir Garam	Ada
9	Katis	Ada
10	Pinang Sebatang	Ada
8	Desa	POSYANDU
1	Cambai	Ada
2	Jelutung	Ada
3	Namang	Ada
4	Belilik	Ada
5	Kayu Besi	Ada
6	Baskara Bhakti	Ada
7	Bukit Kijang	Ada
8	Cambai Selatan	Ada
9	Desa	POSYANDU
1	Lubuk besar	Ada
2	Lubuk Pabrik	Ada
3	Lubuk Lingkok	Ada
4	Batu Beriga	Ada
5	Perlang	Ada
6	Kulur	Ada
7	Trubus	Ada
8	Kulur Ilir	Ada
9	Belimbing	Ada
60	Desa	
4	Desa	POSYANDU
1	Air Putih	Ada
2	Air Belo	Ada

3	Belo Laut	Ada
4	Air Limau	Ada
13	Desa	POSYANDU
1	Pelangas	Ada
2	Kundi	Ada
3	Mayang	Ada
4	Peradong	Ada
5	Air Nyatoh	Ada
6	Berang	Ada
7	Desa Rambat	Ada
8	Desa Simpang Gong	Ada
9	Desa Simpang Tiga	Ada
10	Desa Ibul	Ada
11	Pangek	Ada
12	Bukit Terak	Ada
13	Air Menduyung	Ada
13	Desa	POSYANDU
1	Mancung	Ada
2	Kayu Arang	Ada
3	Pusuk	Ada
4	Dendang	Ada
5	Kacung	Ada
6	Sinar Sari	Ada
7	Beruas	Ada
8	Tebing	Ada
9	Terentang	Ada
10	Tuik	Ada
11	Tugang	Ada
12	Air Bulin	Ada

13	Pangkal Beras	Ada
9	Desa	POSYANDU
1	Tempilang	Ada
2	Tanjung Niur	Ada
3	Sangku	Ada
4	Buyan Kelumbi	Ada
5	Penyampak	Ada
6	Benteng Kota	Ada
7	Air Lintang	Ada
8	Sinar Surya	Ada
9	Simpang Yul	Ada
10		POSYANDU
1	Bakit	Ada
2	Semulut	Ada
3	Puput	Ada
4	Teluk Limau	Ada
5	Kapit	Ada
6	Kelabat	Ada
7	Air Gantang	Ada
8	Sekar Biru	Ada
9	Cupat	Ada
10	Telak	Ada
39	Desa	
9	Desa	POSYANDU
1	Lalang Jaya	Ada
2	Kurnia Jaya	Ada
3	Padang	Ada
4	Kelubi	Ada
5	Lalang	Ada

6	Baru	Ada
7	Buku Limau	Ada
8	Mekar Jaya	Ada
9	Bentaian Jaya	Ada
7	Desa	POSYANDU
1	Gantung	Ada
2	Selinsing	Ada
3	Jangkar Asam	Ada
4	Lilangan	Ada
5	Lenggang	Ada
6	Batu Penyu	Ada
7	Limbongan	Ada
6	Desa	POSYANDU
1	Mentawak	Ada
2	Senyubuk	Ada
3	Cendil	Ada
4	Buding	Ada
5	Mayang	Ada
6	Pembaharuan	Ada
4	Desa	POSYANDU
1	Simpang Tiga	Ada
2	Renggiang	Ada
3	Aik Madu	Ada
4	Lintang	Ada
4	Desa	POSYANDU
1	Simpang Pesak	Ada
2	Tanjung Batu Hitam	Ada
3	Tanjung Kelumpang	Ada
4	Dukong	Ada

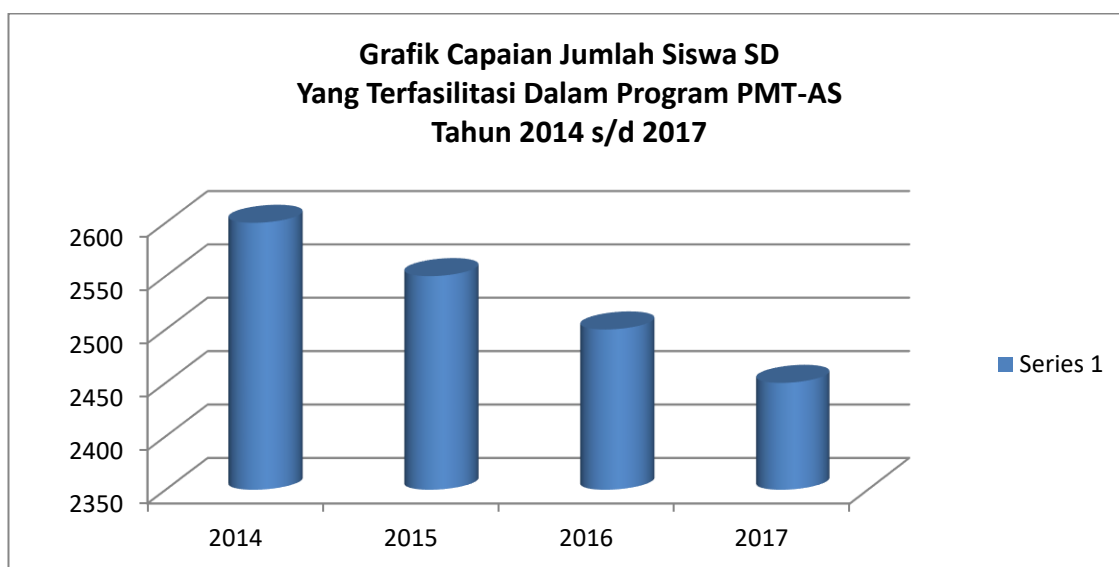
Pada Tahun 2017 jumlah siswa SD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil adalah:

**Jumlah siswa sekolah dasar
yang menerima PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	NAMA SD	JUMLAH SISWA
1	BANGKA	RIAU SILIP	SDN 18 RIAU SILIP	126
2	BANGKA	PDING BESAR	SDN 8 PUDING BESAR	159
3	BANGKA	MENDO BARAT	SDN 33 MENDO BARAT	124
4	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	SDN 14 LUBUK BESAR	172
5	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SDN 3 SUNGAI SELAN	43
6	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SDN 16 SUNGAI SELAN	107
7	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SDN 21 SUNGAI SELAN	84
8	BANGKA BARAT	MUNTOK	SDN 14 MUNTOK	68
9	BANGKA BARAT	MUNTOK	SDN 23 MUNTOK	68
10	BANGKA BARAT	SIMPANG TERITIP	SDN 19SIMPANG TERITIP	68
11	BANGKA BARAT	JEBUS	SDN 6 JEBUS	68
12	BANGKA BARAT	PERIT TIGA	SDN 11 PARIT TIGA	69
13	BANGKA BARAT	KELAPA	SDN 5 KELAPA	68
14	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	SDN 15 AIR GEGAS	85
15	BANGKA SELATAN	PULAU BESAR	SDN 1 PULAU BESAR	193

16	BANGKA SELATAN	SIMPANG RIMBA	SDN 2 SIMPANG RIMBA	213
17	BELITUNG	MEMBALONG	SDN 9 MEMBALONG	64
18	BELITUNG	MEMBALONG	SDN 26 MEMBALONG	49
19	BELITUNG	BADAU	SDN 3 BADAU	50
20	BELITUNG	BADAU	SDN 7 BADAU	68
21	BELITUNG	SIJUK	SDN 6 SIJUK	105
22	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	SDN MUHAMMADIYAH	72
23	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	SDN 2 MANGGAR	216
24	BELITUNG TIMUR	DENDANG	SDN 4 DENDANG	112
25	BELITUNG TIMUR	SIMPANG PESAK	SDN 6 SIMPANG PESAK	80
			JUMLAH	2450

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja dari sasaran ini jumlah siswa sekolah dasar yang menerima PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil pada tahun 2017 mencapai 2450siswa, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2450 siswa dan mencapai 100%.



Maksud dan tujuan dari program ini adalah memberikan asupan gizi peserta didik Sekolah Dasar (SD) melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan minat, kemampuan belajar, ketahanan fisik, serta prestasi sehingga menghasilkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitif.

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator “Jumlah siswa SD yang terfasilitasi Dalam Program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil” adalah : Dengan kondisi perekonomian sekarang ini sehingga berdampak melemahnya perekonomian dan daya beli masyarakat terutama di daerah tertinggal dan terpencil sehingga menyebabkan kurangnya motivasi belajar anak Siswa SD karena kondisi kesehatan.

menurun dan kurangnya wawasan dan pemahaman pengelola penerima bantuan PMT-AS yang terbatas.

Solusi atau upaya untuk mengoptimalkan pencapaian indikator ini adalah : perlu adanya koordinasi, dukungan berjenjang dan kerjasama lintas sektoral dari Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dinas pertanian untuk saling melengkapi. Dan perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi menurunkan gizi buruk pada anak usia Sekolah Dasar dalam upaya mencerdaskan anak sekolah dasar di daerah tertinggal dan terpencil salah satunya melalui Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa

Untuk mengukur kualitas usaha ekonomi produktif masyarakat desa digunakanlah indikator sebagai berikut:

1. Persentase BUMDes yang telah terbentuk dan aktif ditargetkan sebanyak 6 BUMDes
2. Jumlah pasar desa yang telah terbentuk dan aktif ditargetkan sebanyak 12 pasar desa.

Jumlah BUMDes
yang telah terbentuk dan aktif Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah BUMDes yang telah terbentuk dan aktif	6 Bumdes	147 Bumdes	100%

Pada table di atas dapat dilihat bahwa untuk jumlah bumdes yang telah terbentuk dan aktif pada tahun 2017 dapat tercapai 100% lebih dari yang telah ditargetkan. Jumlah ini rata-rata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Realisasi Bumdes yang terbentuk dan aktif Tahun 2017 sebanyak 147 Bumdes sebagai berikut :

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	No.	NAMA Bumdes	NO / PERDES	JENS USAHA	STATUS BUMDes		
							Persia pan	Terbe ntuk	Akti f
BANGKA	PEMALI	Air Ruay	1	MANDIRI BERSAMA	No 8 Thn 2015 tentang	Sewa Tenda,kur si,orgen		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					pendirian BUMdes	tunggal			
		Desa Semapn	2	x	x	x	1		
		Desa Air Duren	3	x	x	x	1		
		Desa Pemali	4	x	x	x	1		
		Desa Karya Makmur	5	MAJU BERSAMA	x	x		1	1
	SUNGAI LIAT	Rebo	6	x	x	x	1		
	BELINYU	Gunung Pelawan	7	PELAWAN BERSATU JAYA	Perdes No. 4 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	Sewa kios, kios saprodi		1	1
		Gunung Muda	8	GUNUNG MUDA BERSATU	Perdes No. 5 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDES	Sewa kios		1	1
	MERAWANG	Kimak	9	DEPATI BAHRIN	x	Perdagangan gas		1	1
		Jada Bahrin	10	BINA MANDIRI	No 02 Thn 2015	SPAM , Pangkalan Gas Elpiji		1	1
		Jurung	11	x	x	x	1		
		Balun ijuk	12	x	x	x	1		
		Pagarawan	13	PAGARAWAN	No 02 Thn 2011	Pasar Desa, Simpan Pinjam, Saprodi,		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

						Retribusi Sampah, Sewa Tenda			
		Baturusa	14	CIPTA BERSAMA	x	Pasar Desa, Sampah, Pasar Malam, Sewa Lapangan Bola, Sewa Gedung Pertemuan, Renting	1		
	MENDO BARAT	Kota Kapur	15	PRASASTI	x	SPAM		1	1
		Penagan	16	PENAGAN BERKARYA	x	SewaTenda		1	1
		Rukam	17	BERGAM BIR	x	Sewa Tenda, Kebun Karet	1		
		Petaling	18	KEMARONG	No 05 th 2016	Perdagangan hasil peternakan berupa ayam potong		1	1
		Petaling Banjar	19	x	x	X	1		
		Kemuja	20	KEMUJA MANDIRI	No. 188/03/08/2013	Spam, Sawit, Karet		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					tentang BUMDes				
		Kace Timur	21	x	x	X	1		
		Labu Air Pandan	22	x	x	X	1		
		Cengkong Abang	23	AYO MAJU	x	X		1	1
		Zed	24	HARAPAN MAKMUR	Perdes No 02 Th 2013	Karet , SPAM Desa		1	1
		Air Duren	25	MAJU BERSAMA	Perdes No. 2 Tahun 2013 tentang BUMDes	SPAM Desa		1	1
	BAKAM	Kapuk	26	KARYA MAJU	No 04 Thn 2014	Perdagangan hasil perkebunan berupa karet dan kelapa sawit, sewa alat perkakas pesta (tenda kursi) dan jasa penggilingan padi, SPAM Desa		1	1
		Desa Tiang Tarah	27	CERMIN JATI	Perdes No. 5 Tahun 2015	SPAM Desa, perdagangan		1	1

					tentang pendirian BUMDES	an hasil perkebunan berupa karet dan kelapa sawit, sewa alat perkakas pesta (tenda-kursi)			
		Desa Dalil	28	ANDAL BERDIKARI	No 02 Thn 2014	brokering (agen 46), Simpan Pinjam, desa wisata		1	1
		Desa Maras Senang	29	BESAOH	Perdes No. 7 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	Perdagangan hasil perkebunan berupa karet dan kelapa sawit, sewa alat perkakas pesta (tenda kursi)		1	1
		Desa Nekkang	30	RENTANG PERMAI	Perdes No. 5 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	sewa alat perkakas pesta (tenda-kursi), pelayanan		1	1

						umum berupa SPAM Desa			
		Desa Bukit Layang	31	KARYA BERSAMA	Perdes No. 8 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	Perdagang an berupa gas LPG		1	1
		Desa Bakam	32	AKEK LAYAU	Perdes No. 2 Tahun 2014 tentang BUMDes	Perdagang an hasil perkebuna n berupa kelapa sawit, sewa alat perkakas (tenda kursi)		1	1
		Desa Mangka	33	BUKIT MANGKA JAYA	No 04 Thn 2015	SPAM Desa, perdagang an hasil perkebuna n berupa kelapa sawit		1	1
		Desa Mabat	34	x	x	X	1		
	PUDING BESAR	Desa Kotawaringin	35	x	x	X	1		
		Desa Kayu Besi	36	BUMDES MENYOSO NG MASA DEPAN	x	Sewa alat perkakas pesta (kursi		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

				GEMILAN G		tenda), pelayanan umum berupa penyediaa n air bersih PAMSIMA S Desa			
		Desa Puding Besar	37	GAMBIR JAYA	Perdes No. 8 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	Sewa alat perkakas pesta (kursi tenda), brokering (jasa pulsa HP/Token)		1	1
		Desa Tanah Bawah	38	JAYA LESTARI	No 07 Thn 2015	Perdagnga n hasil perkebuna n berupa kelapa sawit dan distribusi gas LPG, kios saprodi (distribusi pupuk subsidi)		1	1
		Labu	39	LASKAR KENAKA JAYA	Perdes Nomor 2 Tahun 2011	Pembiayaa n Mikro (Simpan pinjam),		1	1

					tentang Badan Usaha Milik Desa	perdagangan hasil perkebunan berupa kelapa sawit, perdagangan (distribusi gas LPG), sewa alat perkakas pesta (tenda-kursi)			
	RIAU SILIP	Banyu Asin	40	SUMBER MAKMUR	Perdes No 06 Th 2015	Sewa Perlengkapan Pesta, SPAM, Kebun Sawit, Penggilingan Padi, kios saprodi (distribusi pupuk)		1	1
		Riau	41	KUNCER BERKAH	Perdes No. 5 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	Perdagangan berupa pasir bangunan, sewa alat perkakas pesta (tenda-		1	1

						kursi)			
		Pugul	42	AIK BATEK	Perdes No. 10 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	Perdagangan foto copy, sewa alat perkakas pesta (tenda- kursi) dan orgen tunggal		1	1
		Cit	43	CITRA PANCA	Perdes No. 5 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES	Perdagangan hasil perkebuna n berupa kelapa sawit dan ATK foto copy, sewa alat perkakas (tenda kursi)		1	1
		Silip	44	GERBANG MANDIRI	x	sewa alat perkakas pesta (tenda- kursi), dan orgen tunggal		1	1
		Mapur	45	x	x	X	1		
		Deniang	46	x	x	X	1		
		Berbura	47	x	x	X	1		

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

		Pangkal Niur	48	PANGKAL NIUR	Perdes No 05 Th 2015	Sewa Alat Pesta, Pabrik batako, Loket Listrik dan Pulsa, Pemasaran UMKM, SPAM		1	1
TOTAL KABUPATEN			48				16	32	32
BELITUNG TIMUR	GANTUNG	Selinsing	1	Mitra Jaya Selinsing	Perdes No.5 Tahun 2016	Foto copy , Pembuat an Batako , Pengadaa n Bibit		1	1
		Lenggang	2	Lenggang Membangun	Perdes No.3 Tahun 2015	Jasa Pariwisata , Usaha Bersama, Perindustrian, Pertambahan		1	1
		Gantung	3	Makmur Sejahtera	Perdes No.122 Tahun 2015	Cetak Batako		1	1
		Batu Penyu	4	Batu Penyu Maju Berkah	SK.No.141 /KEP/KD BP/VI/2016	Perdagangan & Jasa, Pertanian & Perkebuna		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

						n, Perikanan & Kelautan, Pertamba ngan & Pariwisata			
		Lilangan	5	Bumdes Lilangan	Perdes No.3 Tahun 2014	Percetaka n batako, Pengelolaa n Kebun Karet, Jasa Penyediaa n sarana dan Prasarana Simpan Pinjam, Penyediaa n Sarana Air Bersih Perdagang an		1	1
		Limbongan	6	Sejahtera Bersama	Perdes No. 3 Tahun 2017	Travel dan Kursus Komputer		1	1
		Kelubi	7	Kelubi Makmur	Perdes No. 2 Tahun 2015	Toko Pertanian		1	1
		Lalang	8	Sedulang Jaya	Perdes No. 7 Tahun 2016	Perdagang an Umum, penyewaa n, jasa, dan		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

						peternak n			
		Baru	9	Anugerah Makmur	Perdes No. 6 Tahun 2016	Jasa, Perdagang an sarana dan hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat, pelayanan air bersih dan air minum, pariwisata , perbengke lan.		1	1
	Manggar	Mekar Jaya	10	Mitra Sejahtera	Perdes No. 7 tahun 2016	Jasa jual tiket, pulsa dan galeri		1	1
		Bentaian Jaya	11	Maju Makmur	Perdes No. 5 Tahun 2016	Cetak Batako		1	1
		Padang	12	Mitra Solusi Utama	Perdes No. 3 Tahun 2016	Jasa dan Perdagang an Umum		1	1
		Lalang	13	Lalang Mandiri	Perdes No. 3 Tahun 2017	Jasa, pariwisata , kebutuha n bahan pokok		1	1

	SIMPANG PESAK	Simpang Pesak	14	Sepaham	SK No.07/SK /SP/I/2016	Foto copy, Jual Pakaian Sekolah, Pupuk dari bahan Perkebunan		1	1
		Tanjung Batu Itam	15	Karya Makmut	Perdes No. 4 Tahun 2014	Perdagangan, pertambahan, perkebunan, pertanian		1	1
		Dukong	16	Dukong Mandiri	Perdes No.4 Tahun 2014	Pangkalan Minyak tanah, Nelayan/K elautan		1	1
	DENDANG	Balok	17	Balok Sehati	Perdes No.1 Tahun 2015	Penyedia Air Bersih, Perdagangan, dan Pertanian		1	1
	SIMPANG	Aik Madu	18	Madu sejahtera	Perdes No. 1 Tahun 2017	Peternakan dan perdagangan		1	1
	RENGGIANG	Simpang Tiga	19	Simpang Tige Berkarya		Pengelolaan Kebun Sawit, Penyewaan Traktor,		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

						Penyewaan Molen			
	DAMAR	Aik Kelik	20	Aik Kelik Mandiri	Perdes No.2 Tahun 2016	Pertukangan		1	1
		Suka mandi	21	Sukamandi Sejahtera Bersama	Perdes No. 2 Tahun 2017	Perdagangan, Jasa, Produksi Primer dan Pengelolaa n		1	1
		Mempayak	22	Mang Payak Jaye	Perdes No.4 Tahun 2016	Pengelolaa n Air Minum		1	1
	KELAPA KAMPIT	Mayang	23	Bumdes Harapan Sejahtera	Perdes No.6 Tahun 2015	Isi Ulang Air Minum, Pencucian Motor, Pembuata n Es Batu,.		1	1
		Buding	24	Bumi Jaya	SK.No 18/KPTS/BD/XI/2007 Perdes No. 4 Tahun 2015	Jasa Transportasi, Pembuata n Batako, Simpan Pinjam , Perdagangan , Pasar Desa ,		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

						Kerajinan			
TOTAL KABUPATEN			24				0	24	24
BANGKA SELATAN	AIRGEGAS	SUMBER JAYA PERMAI	1	USAHA JAYA	Perdes No. 3 Tahun 2017	Pertanian, transporta si, alat angkut barang, perkakas pertanian, sewa gedung pertemua n,sewa ruko, warnet		1	1
		FAJAR INDAH	2	Fajar Sejahtera	Perdes No. 2 Tahun 2017	transporta si, pertanian, alat angkut barang,pe rkakas pesta,sew a gedung pertemua n,sewa ruko,warn et,barang sewaan		1	1
		AIR BARA	3	Karya Bersama	Perdes No. 3 Tahun 2017	Air minum desa, usaha		1	1

						listrik desa,lumbung pangan,su ber daya lokal, ttg,alat transporta si,perkaka s pesta,sew a gedung pertemua n,ruko,pe ngelolaan air bersih			
		SIDOHARJO	4	Karya Bersama	Perdes No. 3 tahun 2012	Simpan pijam, usaha depot air minum, pengelolaa n air bersih		1	1
		BENCAH	5	BENCAH MANDIRI	Proses	pupuk, perta mba ngan, sembako		1	1
	TOBOALI	RIAS	6	HARAPAN MAKMUR	Proses	Perdagang an, Beras		1	1
		KEPOH	7	HARMONI S	Perdes No. 4 Tahun 2017	Alat transporta si,alat pertanian, perkakas		1	1

						pesta,alat pengangk ut barang,se wa gedung pertemua n,ruko,wa rnet			
	LEPAR PONGOK	PENUTUK	8	BERDAD MARHEN	188.4/05/ DPTK/201 7	Penyediaa n air minum, jasa transporta si,jasa keuangan /simpan pinjam		1	1
		TANJUNG SANGKAR	9	SENIUR BERSINA R	Perdes No. 5 Tahun 2017	Alat transporat si,alat angkut barang,ala t pertanian, perkakas pesta,ged ung pertemua n,ruko,wa rnet		1	1
		KUMBUNG	10	KELAPAN LESTARI	Perdes No.4 Tahun 2017	Alat transporat si,alat angkut barang,ala		1	1

						t pertanian, perkakas pesta,ged ung pertemua n,ruko,wa rnet,baran g sewaan			
		TANJUNG LABU	11	MAJU BERSAMA	Perdes No. 6 Tahun 2016	Alat perkakas pesta, gedung pertemua n, pasar desa, rumah penginapa n, barang sewaan, sinpan pinjam, usaha pariwisata , usaha perdagang an		1	1
	SIMPANG RIMBA	SEBAGIN	12	BINA RAKYAT	188.45/1/ DSBG/20 17	Alat transporat si,alat angkut barang,ala t pertanian, perkakas		1	1

						pesta,gedung pertemuan,ruko,warinet,barang sewaan			
	PULAU BESAR	PANCA TUNGGAL	13	SENTOSA JAYA	Perdes No.3 Tahun 2016	Alat transportasi,alat angkut barang,alat pertanian, perkakas pesta,gedung pertemuan,ruko,warinet		1	1
	PAYUNG	SENGIR	14	MERUNG BERJAYA	Perdes No.7 Tahun 2017	Toko usaha pakaian, simpan pinjam, toko material, depot air minum, perdagangan hasil pertanian dan perikanan, perdagangan		1	1

						an pupuk bersubsidi, penyediaan air bersih, pengelolaan pasar desa, penyediaan alat pesta			
		PAKU	15	MAJU MAKMUR	Perdes No. 3 Tahun 2017	Alat transportasi, alat angkut barang, alat pertanian, perkakas pesta, gedung pertemuan, ruko, warung, barang sewaan		1	1
	TUKAK SADAI	SADAI	16	SADAI MANDIRI SEJAHTERA	Perdes No. 7 Tahun 2017	Toko usaha pakaian, simpan pinjam, toko material, depot air minum,		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

						perdagangan hasil pertanian dan perikanan , perdagangan pupuk bersubsidi , penyediaa n air bersih, pengelolaa n pasar desa, penyediaa n alat pesta			
		TUKAK	17	USAHA BERSAMA	Perdes No.4 Tahun 2017	Alat transportasi,alat angkut barang,alat pertanian, perkakas pesta,gedung pertemuan,ruko,war net,barang sewaan		1	1
TOTAL KABUPATEN			17				0	17	17

BANGKA TENGAH	KOBA	NIBUNG	1	Nibung Jaya Abadi	No. 04 Tahun 2016 Tgl 18 Maret 2016	budidaya serai wangi, dan budidaya ikan lele		1	1
		TERENTANG III	2	Berpanen	No. 02 Tahun 2013 Tgl 10 April 2013	Gas Elpiji 3 Kg, Simpan Pinjam(per kreditasi barang)		1	1
		KURAU	3	Bersampan	No.01 Tahun 2016	jasa transportasi kapal wisata, pengelolaan SPAM, dan sewa lapangan futsal.		1	1
		KURAU BARAT	4	Berpukat	No. 01 Tahun 2015 Tgl 5 Januari 2015	pengelolaan SPAM, pengelolaan pasar desa, jasa sewa tenda- kursi untuk penganten .		1	1
		PENYAK	5	Ketapang Laut	No. 01 Tahun 2016 Tgl	Kios Pertanian		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					17 Mei 2016				
		GUNTUNG	6	Berkusir Jaya	No. 04 Tahun 2016 Tgl 9 Maret 2016	Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Pertanian dan Perkebunan		1	1
	SIMPANG KATIS	PINANG SEBATANG	7	Mandiri Sejati	No. 05 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 2012	Simpan Pinjam		1	1
		PUPUT	8	Puput Abadi	No. 001.001/19.04.04.2005/2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa tanggal 08 Oktober 2013	Perdagangan Batako, Jasa Sewa Alat Berat		1	1
		PASIR GARAM	9	MITRA MANDIRI	No. 01 Tahun 2016	Pertanian (Kasesa/Ubi Racun)		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

		CELUAK	10	KARYA MEMBAN GUN	No. 02 tahun 2012 tentang pembentu kan Badan Usaha Milik Desa tanggal 18 2012	Ternak Ayam		1	1
	SUNGAI SELAN	MELABUN	11	Melabun Jaya	Perdes Nomor. 82/19040 3/MLB/Ta hun 2012 tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa tanggal 20 September 2012	Pengadaa n Bibit Sawit		1	1
		LAMPUR	12	Mitra Usaha Bersama	44/KPTS/ 2004/201 5	Simpan Pinjam,Pet ernakan,P ertanian,P erkebuna n,Kehutan an,Pertam bangan Perdagang an umum		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

						dan Jasa			
		TANJUNG PURA	13	BATU NEK	No. 02 tahun 2015 No. SK: 188.45/0. 18/BUMD ES/19043 2009/201 5	SIMPAN PINJAM,J asa Boga(Kate ring &jasa Penyewaa n alat-alat Hajatan, Jasa Pengadaa n Barang, Jasa Konstruks i		1	1
		MUNGGU	14	MUNGGU SEJAHTE RA	01 Tahun 2014	Usaha tepung mopak dan beras ubi		1	1
		KERAKAS	15	M TRI	05 Tahun 2016	Toko Pertanian		1	1
		KERETAK	16	KERETAK LESTARI	188,4/11/ 19040320 03/2015 tgl 2 Jan 2015	Simpan Pinjam,Pa riwisata,P erindustri an,Perdag angan umum dan Jasa		1	1
		SUNGAI SELAN ATAS	17	SELAN ATAS BETEDUH	Nomor 7 Tahun 2016	Kios Pertanian		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					Tanggal 18 November 2016				
		KERETAK ATAS	18	Belum Ada	Perdes No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa tanggal 30 Oktober 2012	Penjualan Kue dan Susu Kedelai		1	1
		KERANTAI	19	KERANTAI MANDIRI	x	Peternaka n Ayam		1	1
	PANGKALAN BARU	PADANG BARU	20	Padang Mandiri	No. 03 Tahun 2013	Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg		1	1
		KEBINTIK	21	Suara Bombang	NO. 3 Tahun 2014 Tgl 28 Februari 2014	Usaha Sewa Tenda		1	1
		BATU BELUBANG	22	Babel Betapak	No. 03 Tahun 2014	Usaha Simpan Pinjam, Usaha Sembako		1	1
		BENTENG	23	Benteng Sejahtera	NO. 6 Tahun 2015 Tgl	Usaha Jasa Parkir,		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					30 Januari 2015	Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg			
		AIR MESU	24	Makmur Berjaya	No. 02 tahun 2013	Mesin Pencacah sampah dan pengelolaan bank sampah		1	1
		AIR MESU TIMUR	25	Timur Jaya	No. 03 Tahun 2013	Usaha Fotokopi/ ATK, Usaha Jual Beli Motor Bekas, Kebun Sawit		1	1
		TANJUNG GUNUNG	26	Biru Tanjung	No. 4 Tahun 2012 Tgl 12 September 2012	Usaha Jasa Angkutan		1	1
		PEDINDANG	27	Maju Bersama	No. 1 Tahun 2015 Tgl 17 Februari 2015	Usaha Simpan Pinjam		1	1
		JERUK	28	JERUK JAYA	x	Peternakan Babi, Kerjasama Furniture,		1	1

						dan Simpan Pinjam			
	LUBUK BESAR	KULUR	29	Kulur Makmur	No. 02 Tahun 2015	Penjualan Alat Pertanian		1	1
		LUBUK PABRIK	30	Pabrik Berjaya	No. 4 Tahun 2015	Toko Galery Makanan Khas Bangka dan mengelola Pasar Desa, butik (pedagaga n baju dan hijab).		1	1
		LUBUK BESAR	31	Bina Usaha	No. 3 Tahun 2012 Tgl 26 September 2012	Peternaka n(pengge mukan sapi), dan perdagang an kompos		1	1
		BATU BERIGA	32	Bahari Jaya	No. 4 Tahun 2016 Tgl 1 Maret 2016	Sektor Perikanan Air Tawar (budidaya ikan lele) dan Pariwisata		1	1
		TERUBUS	33	Sumber Rezeki	No. 02 Tahun	Pengelolaa n sampah		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					2014	dan perdagangan ATK			
		PERLANG	34	Karya Bersama	No. 01 Tahun 2014	jasa transportasi/jasa pengiriman mitra PT.WALI TAMPAS, bank desa, dan budidaya serai wangi.		1	1
		KULUR ILIR	35	Harapan Baru	No. 07 Tahun 2015	Cetak Batako		1	1
		BELIMBING	36	Belimbing Duren	No. 05 Tahun 2015	Penjualan Alat Pertanian		1	1
	NAMANG	BELILIK	37	Milik Bersama	05/2012 Tgl 23 Oktober 2012	budidaya ikan lele dan plasma sawit.		1	1
		NAMANG	38	Pelawan	04/2012 Tgl. 2 November 2012	pengrajin kusen, parkir hutan pelawan.		1	1
		JELUTUNG	39	Mahameru	01/2015 Tgl 15 Juni 2015	perdagangan ATK dan jasa fotokopi		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

		CAMBAI	40	Bedaun Makmur	02/2015 Tgl. 5 Oktober 2015	Pembibitan Lada		1	1
		CAMBAI SELATAN	41	Bernila	03/2013 Tgl. 16 Maret 2013	perdagangan (jual-beli sampah), pengelolaan sampah (bank sampah), kuliner, dan jual-beli ATK.		1	1
		KAYU BESI	42	Bina Mitra	03/2012 Tgl. 19 Oktober 2012	depot air minum.		1	1
		BASKARA BAKTI	43	Becampak	02/2015 Tgl 7 Jan 2015	Air PAM		1	1
		BUKIT KIJANG	44	Bukit Kijang Sejahtera	04/2015 Tgl. 16 Okt 2015	BATAKO		1	1
TOTAL KABUPATEN			44				0	44	44
BELITUNG	BADAU	AIR BATU BUDING	1	SEJAHTERA ABADI	Nomor 4 TAHUN 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha	Sewa Barang, Simpan Pinjam, Sewa Angkutan, Saprotran, Penjualan		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					Milik Desa	Batako, Sewa Toko dan Kontrakan			
		SUNGAI SAMAK	2	MANDIRI	Nomor 3 TAHUN 2017 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa	Sewa Angkutan Mobil		1	1
		Badau	3	MITRA SEJAHTERA	Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa	Galeri Desa, Kantin Desa		1	1
		Cerucuk	4	MAJU BERSAMA	Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa	Penyewaa n Gedung SG, Penyewaa n Alat Resepsi, Pengelolaa n Arena Gastrack, Perdagang an		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

		Pegantungan	5	AMANA H BERJAYA SEJAHT ERA	Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa	Penyewaa n kapal laut, Penyewaa n Alat Resepsi, Rental Mobil, Air Mineal		1	1
	SIJUK	Air Selumar	6	SELUMAR SEJAHT ERA / BERSATU		Perdagang an (pupuk), Penyewaa n Alat Resepsi	1		
		Tanjung Binga	7	LENGKUA S KITE	Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa	Galery Desa, Jasa Transport asi Laut, Penyewaa n Alat Resepsi, Perdagang an, Kios Nelayan, Kios Sembako, Usaha Perikanan		1	1
		Terong	8	SEJAHT ERA BERSAMA	Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentu	Galery Desa, Rumah Singgah, Agrowisat		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					kan Badan Usaha Milik Desa	a, Air Rusa Berehun (ARB), Wisata Mangrove			
	MEBALONG	Membalong	9	SEJAHTERA	Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa	Simapn- pinjam bergulir, Penyewaa n Alat Resepsi, Pengelolaa n Pasar Desa		1	1
		Perpat	10	SINAR KUBING	Nomor 190 Tahun 2016 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa	Penyewaa n Barang/J asa, Pengelolaa n Hutan Desa, Pengadaa n Barang		1	1
		Padang Kandis	11		Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentu kan Badan Usaha Milik Desa		1		
TOTAL			11				2	9	9

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

KABUPATEN									
BANGKA BARAT	JEBUS	Rukam	1	BUMDes Karya Mandiri	Perdes No. 5 Tahun 2014 dan SK 188.45/20 /2006/20 14	Perdagang an; Jual beli TBS sawit		1	1
		Tumbak Petar	2	BUMDes Sinar Harapan	Perdes No. 5 Tahun 2015 dan SK Nomor 188.45/02 /2003/20 15	1. Bisnis keuangan; Usaha simpan pinjam, 2. Perdagang an; Jual beli TBS sawit		1	1
		Limbung	3	BUMDes Limbung Berdikari	Perdes No. 2 Tahun 2015 dan SK Nomor 188.45/50 /19.05.03. 2004/201 5	Bisnis sosial; Jual beli gas LPG		1	1
		Sinar Manik	4	BUMDes Manik Jaya	Perdes No. 2 Tahun 2015 dan SK Nomor 188.45/50 /19.05.03. 2020/201 5	1. Perdagang an; Pabrik cetak batako, 2. Bisnis sosial ; Jual beras & gas LPG		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

		Ketap	5	BUMDes Penyabung Jaya	Perdes No. 2 Tahun 2015 dan SK Nomor 188.45/29 /19.05.03. 2007/201 5	Perdagang an; Sarana produksi tani; jual pupuk		1	1
		Air Kuang	6	BUMDes Kuang Seganden g	Perdes No. 2 Tahun 2015 dan SK Nomor 188.45/28 /19.05.03. 2011/201 5	Bisnis keuangan; Usaha simpan pinjam		1	1
		Sungai Buluh	7	BUMDes Sungai Buluh Berkah	Perdes No. 3 Tahun 2015 dan SK Nomor 188.45/24 /19.05.03. 2002/201 5	Perdagang an; Jual beli TBS sawit & pupuk		1	1
	PARITTIGA	Bakit	8	BUMDes Pantai Mandiri	Perdes No. 19 Tahun 2014 dan SK Nomor 188.45/32 /19.05.06. 2004/201 4	Perdagang an: Rumah makan wisata pantai		1	1
		Telak	9	BUMDes Pelikas	Perdes No. 2 Tahun 2015 dan	Bisnis sosial; Jual air		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					SK Nomor 188.45/30 /19.05.03. 2002/2015	minum isi ulang			
		Teluk Limau	10	BUMDes Mandiri Sejahtera	Perdes No. 2 Tahun 2016 dan SK Nomor 188.45/27 /19.06.03. 2010/2016	Perdagangan; Penggemukan sapi		1	1
		Kapit	11	BUMDes Sinar Antan	Perdes No. 2 Tahun 2016 dan SK Nomor 188.45/08 /19.05.06. 2008/2016	Perdagangan; Budidaya kepiting bakau		1	1
	SIMPANG TERITIP	Air Nyatoh	12	BUMDes Baler Jaya	Perdes No. 118.45/18 /2015 dan SK Nomor 188.45/18 /19.05.04. 2005/2015	1. Bisnis sosial; Distribusi air minum, 2. Persewaan ; Tenda dan kursi		1	1
		Pangek	13	BUMDes Mekar Sari	Perdes Nomor 4 Tahun 2016 dan SK Nomor 188.45/51	Jual Bahan Bakar Minyak		1	1

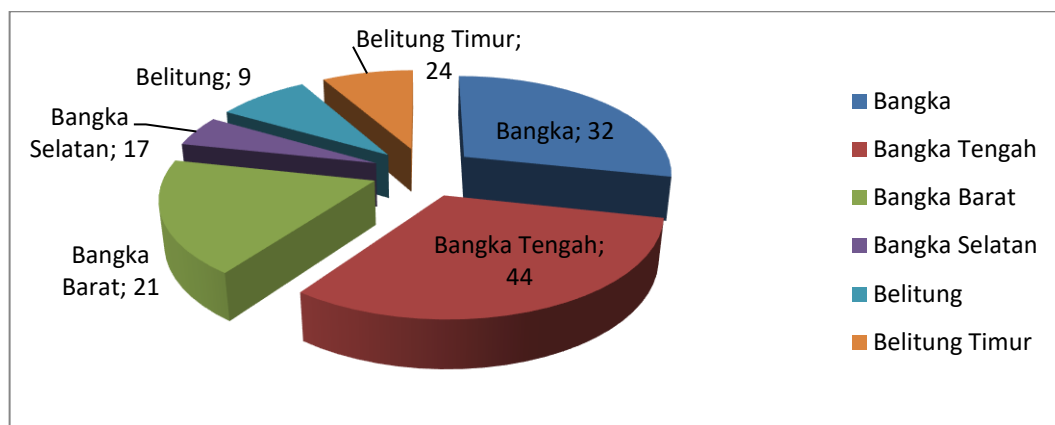
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

					/19.05.04. 2011/201 6				
		Pelangas	14	Pelangas Jaya Bersama	Perdes No. 4 Tahun 2017 dan SK Nomor 188.45/29 /19.05.02. 2001/201 7	Sewa tenda, kursi, panggung, dan distributor bahan bakar minyak		1	1
		Peradong	15	Peradong Berkah	Perdes No. 5 Tahun 2017 dan SK Nomor 188.45/29 /19.05.02. 2004/201 7	Distributor LPG		1	1
		Simpang Tiga	16	BUMDes Maju Sejahtera	Perdes Nomor 5 Tahun 2016 dan SK Nomor 188.45/30 /SK/2009 /2016	Bisnis sosial; Distribusi air minum		1	1
	KELAPA	Sinar Sari	17	BUMDes Sinar Mandiri	Perdes No. 10 Tahun 2015 dan SK Nomor 188.45/10 /19.05.04. 2007/201	Perdagang an; Perkebuna n sawit dan karet		1	1

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

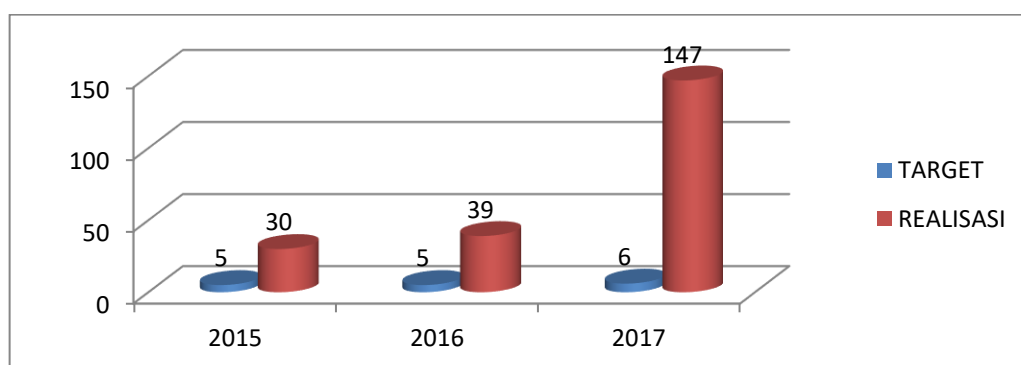
					5				
	TEMPILANG	Air Lintang	18	BUMDes Lintang Makmur	Perdes No. 1 Tahun 2016	Perdagangan; Budidaya dan jual beli ubi kasesa		1	1
		Penyampak	19	BUMDes SEUMAH SEKAWA	Perdes No 5 Tahun 2017	Perkebunan Sawit		1	1
		Sinar Surya	20	BUMDes Binjul Jaya	Perdes No 3 Tahun 2016	Bisnis keuangan; Usaha simpan pinjam		1	1
	MUNTOK	Air Limau	21	BUMDes Pal 9	Perdes No 3 Tahun 2016	Perdagangan; Jual beli ubi kacesa		1	1
TOTAL KABUPATEN			21				0	21	21
TOTAL PROVINSI			165				18	147	147

GrafikCapaian BUMDes
Yang Terbentuk dan AktifTahun 2017



Untuk tahun 2017 tercapai sebesar 245,00% dari target 6 Bumdes yang telah terbentuk dan aktif sedangkan realisasinya 147 Bumdes. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 78% dari target 50 Bumdes baru terealisasi 39 Bumdes. Terdapat peningkatan sebanyak 108 Bumdes di tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik Capaian Indikator Kinerja
Jumlah BUMDes Yang AktifTahun 2017



Hal tersebut dapat dicapai karena BUMDes diperlukan sebagai pusat pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

Adapun masalah yang dalam pencapaian indikator Jumlah bumdes yang telah terbentuk dan aktif adalah :

1. Belum optimalnya sosialisasi masalah peraturan menteri desa No. 4 Tahun
2. Kurang kreatifnya aparatur desa dalam menggali potensi desa.
3. Pencapaian indikator “ Jumlah bumdes yang terbentuk dan aktif” masih kurang optimal dikarenakan tidak adanya penganggaran untuk pembinaan maupun pendampingan Bumdes.

Solusi atau upaya untuk mengoptimalkan pencapaian indikator ini adalah :

1. Diperlukannya pendampingan pembentukan, pendampingan teknis dan pengelolaan manajemen keuangan Bumdes.
2. Diperlukannya sosialisasi yang intensif terhadap bumdes sampai kepada pengembangan usaha yang ada.

**Jumlah pasar desa
yang telah terbentuk dan aktif Tahun 2017**

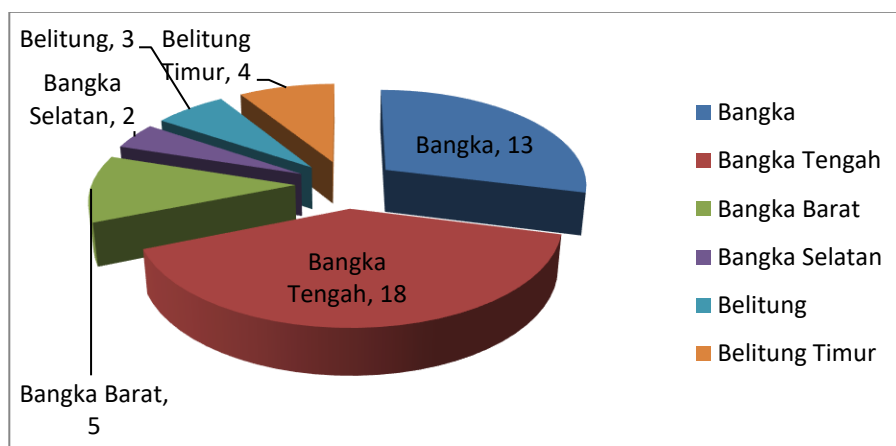
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pasar desa yang telah terbentuk dan aktif	12 Pasar desa	45 pasar desa	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk jumlah pasar desa yang telah terbentuk dan aktif pada tahun 2017 dapat tercapai 100% seperti yang telah ditargetkan. Jumlah ini rata-rata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Target dari indikator tersebut pasar desa yaitu Kabupaten Bangka terdiri dari Desa Pagarawan, Air anyir, Baturusa, Merawang, Penagan, Petaling, Puding Besar, Maras Senang, Riau, Pangkalniur, Air Duren, Air Ruay dan Rebo.

Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari Desa Nibung, Penyak, Kurau, Munggu, Kemingking, lampur, Simpang katis, Air Mesu, Benteng, Batu Belubang, Tanjung Gunung, Belilik, Cambai Selatan, Jelutung, Lubuk Pabrik, Lubuk Lingkung, Lubuk Besar dan Batu Beriga. Kabupaten Belitung terdiri dari Desa Membalong. Badau, Ibul. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari Desa Simpang Rimba dan Air Bencah. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Desa Sukamandi, Lalang jaya, Mekar jaya, Buding. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Desa Jebus, Kapit, Tempilang, Puput, Pelangas.

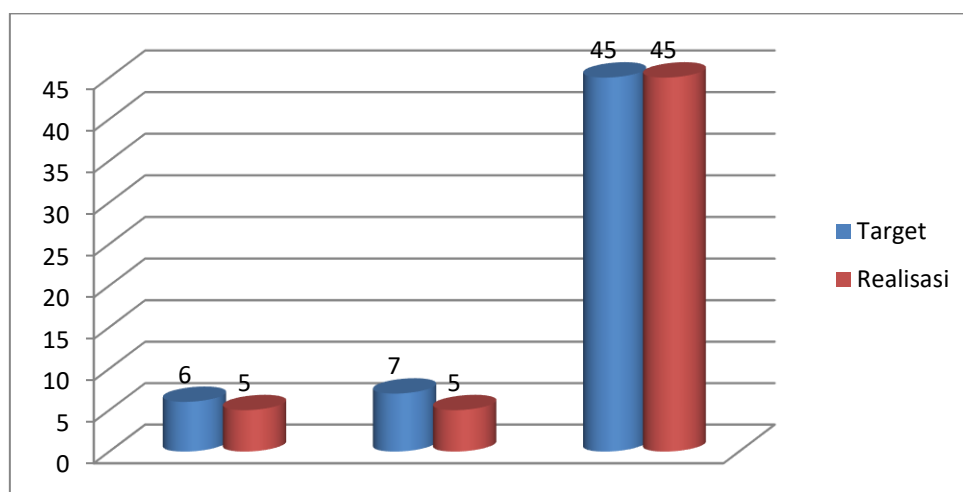
Capaian Indikator

Jumlah Pasar Desa Yang Terbentuk dan Aktif Tahun 2017



Untuk tahun 2017 tercapai sebesar 71,42% dari target pasar desa sedangkan realisasinya 45 pasar desa mengalami peningkatan pasar desa dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Capaian Indikator
Jumlah Pasar Desa Yang Terbentuk dan Aktif Tahun 2017



Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam hal pembinaan ke desa.

Adapun masalah di tahun 2017 dalam pencapaian indikator Jumlah pasar desa yang terbentuk dan aktif adalah :

1. Belum adanya penyerahan aset dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa.
2. Belum adanya penganggaran khusus untuk pengembangan dan pembinaan.

Solusi atau upaya untuk mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dengan meningkatkan

pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam upaya optimalisasi pasar desa.

**DATA PASAR DESA YANG TERBENTUK DAN AKTIF
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017**

Kecamatan	DESA	
3	4	
Kecamatan	38	
Merawang	2	Desa
	1	Batu Rusa
	1	Pagarawan
Lepar Pongok	1	Desa
	1	Tanjung Sangkar
Air Gegas	5	Desa
	1	Air Gegas
	1	Delas
	1	Pergam
	1	Nyelanding
	1	Air Bara
Simpang Rimba	3	Desa
	1	Jelutung II
	1	Rajik
	1	Permis
Payung	7	Desa
	1	Payung
	1	Malik
	1	Sengir

	1	Pangkal Buluh
	1	Bedengung
	1	Ranggung
	1	Paku
Tukak Sadai	1	Desa
	1	Tukak
Pulau Besar	1	Desa
	1	Batu Betumpang
Kecamatan		Desa
Koba	2	Desa
	1	Nibung
	1	Kurau Barat
Pangkalan Baru	2	Desa
	1	Benteng
	1	Air Mesu
Namang	1	Desa
	1	Namang
Lubuk Besar	3	Desa
	1	Lubuk Lingkok
	1	Batu Beriga
	1	Perlang
Simpang Teritip	3	Desa
	1	Pelangas
	1	Kundi
	1	Pangek
Tempilang	1	Desa
	1	Benteng Kota
Kecamatan		Desa
Manggar	1	Desa

	1	Lalang Jaya
Kelapa Kampit	2	Desa
	1	Buding
	1	Pembaharuan
Simpang Renggiang	1	Desa
	1	Lintang
Simpang Pesak	2	Desa
	1	Simpang Pesak
	1	Tanjung Batu Hitam

DATA RTS

SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAUN 2017

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)
1	Pangkalpinang	5.682
2	Bangka Barat	4.270
3	Bangka	10.100
4	Bangka Selatan	4.223
5	Bangka Tengah	6.275
6	Belitung	8.348
7	Belitung Timur	4.121
JUMLAH RTS		43.019

Provinsi	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten	71	KOTA PANGKAL PINANG
Jumlah Rumah Tangga		5512
Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah Tangga
BUKIT INTAN - 020		900
	AIR ITAM - 010	122
	AIR MAWAR - 013	104
	BACANG - 009	83
	PASIR PUTIH - 014	156
	SEMABUNG LAMA - 008	208
	SINAR BULAN - 011	112
	TEMBERAN - 012	115
GABEK - 031		669
	AIR SALEMBA - 001	107
	GABEK DUA - 003	209
	GABEK SATU - 002	120
	JERAMBAH GANTUNG - 005	84
	SELINDUNG - 006	58
	SELINDUNG BARU - 004	91
GERUNGGANG - 041		962
	AIR KEPALA TUJUH -	118

	007	
	BUKIT MERAPEN - 004	153
	BUKIT SARI - 005	142
	KACANG PEDANG - 002	142
	TAMAN BUNGA - 006	69
	TUATUNU INDAH - 003	338
GIRIMAYA - 021		636
	BATU INTAN - 003	74
	BUKIT BESAR - 002	170
	PASAR PADI - 005	74
	SEMABUNG BARU - 004	170
	SRIWIJAYA - 001	148
PANGKAL BALAM - 030		749
	AMPUI - 006	145
	KETAPANG - 016	239
	LONTONG PANCUR - 009	136
	PASIR GARAM - 010	73
	REJOSARI - 015	156
RANGKUI - 010		1064
	ASAM - 001	152
	BINTANG - 004	85
	GAJAH MADA - 016	37
	KERAMAT - 010	196

	MASJID JAMIK - 013	17
	MELINTANG - 009	143
	PARIT LALANG - 002	313
	PINTU AIR - 015	121
TAMAN SARI - 040		532
	BATIN TIKAL - 019	53
	GEDUNG NASIONAL - 021	153
	KEJAKSAAN - 023	152
	OPAS INDAH - 022	104
	RAWA BANGUN - 020	70

Provinsi	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten	04	BANGKA TENGAH
Jumlah Rumah Tangga		6972
Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah Tangga
KOBA - 010		1199
	ARUNG DALAM - 007	64
	BEROK - 015	35
	GUNTUNG - 008	30
	KOBA - 006	110
	KURAU - 011	174
	KURAU BARAT - 012	125
	NIBUNG - 001	170
	PADANG MULIA - 014	124
	PENYAK - 010	191

	SIMPANG PERLANG - 013	136
	TERENTANG TIGA - 009	40
LUBUK BESAR - 011		1357
	BATU BERIGA - 008	173
	KULUR - 001	107
	KULUR ILIR - 002	113
	LUBUK BESAR - 005	269
	LUBUK LINGKUK - 007	80
	LUBUK PABRIK - 006	255
	PERLANG - 004	290
	TERUBUS - 003	70
NAMANG - 021		623
	BASKARA BAKTI - 007	153
	BELILIK - 001	96
	BUKIT KIJANG - 006	71
	CAMBAI - 004	95
	JELUTUNG - 003	83
	KAYU BESI - 005	42
	NAMANG - 002	84
PANGKALAN BARU - 020		1403
	AIRMESU - 008	146
	BATU BELUBANG - 015	131

	BELULUK - 014	104
	BENTENG - 007	85
	DUL - 009	163
	JERUK - 013	73
	MANGKOL - 010	144
	PADANG BARU - 012	138
	PEDINDANG - 016	69
	TANJUNG GUNUNG – 006	350
SIMPANG KATIS - 040		813
	BERUAS - 006	73
	CELUAK - 002	81
	KATIS - 010	68
	PASIR GARAM - 008	114
	PINANG SEBATANG – 009	41
	PUPUT - 003	81
	SIMPANG KATIS – 004	96
	SUNGKAP - 001	68
	TERAK - 007	110
	TERU - 005	81
SUNGAI SELAN - 030		1577
	KEMINGKING - 011	144
	KERAKAS - 014	48
	KERANTAI - 003	20
	KERETAK - 008	165

	LAMPUR - 002	176
	MUNGGU - 010	147
	RAMADHON - 013	79
	SARANGMANDI - 009	105
	SUNGAI SELAN - 001	431
	SUNGAI SELAN ATAS - 012	159
	TANJUNGPURA - 015	103
Provinsi	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten	01	BANGKA
Jumlah Rumah Tangga		9182
Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah Tangga
BAKAM - 092		781
	BAKAM - 006	109
	BUKITLAYANG - 009	94
	DALIL - 005	83
	KAPUK - 002	67
	MABAT - 008	56
	MANGKA - 007	79
	MARAS SENANG – 001	48
	NEKNANG - 003	142
	TIANG TARA - 004	103
BELINYU - 130		1498
	AIR JUKUNG - 013	110

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

	BINTET - 015	157
	BUKIT KETOK - 014	220
	GUNUNG MUDA – 011	153
	GUNUNG PELAWAN – 016	253
	KUTO PANJI - 012	201
	LUMUT - 009	42
	RIDING PANJANG – 010	362
MENDO BARAT - 070		2118
	AIR BULUH - 004	50
	AIRDUREN - 007	26
	CENGKONGABANG – 006	177
	KACE - 005	158
	KACE TIMUR - 014	46
	KEMUJA - 011	263
	KOTA KAPUR - 001	120
	LABUH AIR PANDAN - 013	102
	MENDUK - 009	146
	PAYABENUA - 010	313
	PENAGAN - 002	208
	PETALING - 008	237
	RUKAM - 003	130
	ZED - 012	142
MERAWANG - 080		688

	AIR ANYIR - 015	39
	BALUNIJUK - 012	125
	BATURUSA - 014	34
	DWI MAKMUR - 017	5
	JADA BAHRAIN - 011	120
	JURUNG - 018	68
	KIMAK - 010	61
	MERAWANG - 019	37
	PAGARAWAN - 013	141
	RIDING PANJANG – 016	58
PEMALI - 091		337
	AIR DUREN - 003	38
	AIR RUAI - 004	68
	KARYA MAKMUR – 005	31
	PEMALI - 002	62
	PENYAMUN - 001	74
	SEMPAN - 006	64
PUDING BESAR - 081		1184
	KAYU BESI - 007	109
	KOTAWARINGIN – 001	203
	LABU - 005	214
	NIBUNG - 004	172
	PUDINGBESAR - 006	268
	SAING - 002	115
	TANAH BAWAH - 003	103

RIAU SILIP - 131		1181
	BANYU ASIN - 001	101
	BERBURA - 009	109
	CIT - 004	257
	DENIANG - 005	121
	MAPUR - 006	86
	PANGKAL NIUR - 002	283
	PUGUL - 003	96
	RIAU - 008	60
	SILIP - 007	68
SUNGAI LIAT - 090		1395
	KENANGA - 014	75
	KUDAY - 019	60
	PARIT PADANG - 016	287
	REBO - 015	144
	SINAR BARU - 020	149
	SRIMENANTI - 017	171
	SUNGAILIAT - 018	509

Provinsi	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten	03	BANGKA BARAT
Jumlah Rumah Tangga		4744
Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah Tangga
JEBUS - 050		645
	AIR KUANG - 019	11
	JEBUS - 001	57

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

	KETAP - 011	21
	LIMBUNG - 003	63
	MISLAK - 018	91
	PEBUAR - 020	28
	RANGGI/ASAM - 009	92
	RUKAM - 004	63
	SINAR MANIK - 021	21
	SUNGAI BULUH - 010	23
	TUMBAK PETAR – 002	175
KELAPA - 010		1150
	AIR BULIN - 017	94
	BERUAS - 014	37
	DENDANG - 018	167
	KACUNG - 019	42
	KAYUARANG - 010	51
	KELAPA - 013	120
	MANCUNG - 011	57
	PANGKAL BERAS – 023	43
	PUSUK - 015	84
	SINAR SARI - 012	48
	TEBING - 016	66
	TERENTANG - 020	117
	TUGANG - 021	215
	TUIK - 022	54
MENTOK - 030		734
	AIR BELO - 004	106
	AIR PUTIH - 008	37

	AIRLIMAU - 009	16
	BELOLAUT - 001	323
	SUNGAI BARU - 005	34
	SUNGAI DAENG – 006	79
	TANJUNG - 007	139
PARITTIGA - 051		410
	AIR GANTANG - 007	59
	BAKIT - 001	27
	CUPAT - 009	49
	KAPIT - 003	25
	KELABAT - 008	36
	PUPUT - 006	50
	SEKAR BIRU - 005	37
	SEMULUT - 002	43
	TELAK - 004	13
	TELUK LIMAU - 010	71
SIMPANG TERITIP – 040		1144
	AIR MENDUYUNG – 012	52
	AIR NYATOH - 010	177
	BERANG - 007	179
	BUKIT TERAH - 013	34
	IBUL - 008	138
	KUNDI - 001	45
	MAYANG - 003	30
	PANGEK - 011	102
	PELANGAS - 006	37

	PERADONG - 009	193
	RAMBAT - 004	22
	SIMPANG GONG – 005	23
	SIMPANG TIGA - 002	112
TEMPILANG - 020		661
	AIR LINTANG - 003	42
	BENTENG KUTA – 002	32
	BUYAN KELUMBI – 006	85
	PENYAMPAK - 008	54
	SANGKU - 007	126
	SIMPANG YUL - 009	69
	SINAR SURYA - 004	75
	TANJUNGNIUR - 001	154
	TEMPILANG - 005	24

Provinsi	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten	05	BANGKA SELATAN
Jumlah Rumah Tangga		3890
Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah Tangga
AIR GEGAS - 040		712
	AIR BARA - 010	41
	AIRGEGAS - 004	38
	BENCAH - 002	13

	DELAS - 005	111
	NANGKA - 008	53
	NYELANDING - 007	72
	PERGAM - 001	28
	RANGGAS - 009	55
	SIDOHARJO - 006	171
	TEPUS - 003	130
LEPAR PONGOK - 050		558
	CELAGEN - 006	76
	KUMBUNG - 005	26
	PENUTUK - 001	84
	PONGOK - 003	249
	TANJUNG SANGKAR - 004	61
	TANJUNGLABU - 002	62
PAYUNG - 010		486
	BEDENGUNG - 005	37
	IRAT - 006	34
	MALIK - 018	60
	NADUNG - 009	31
	PAKU - 020	35
	PANGKALBULUH - 017	46
	PAYUNG - 008	124
	RANGGUNG - 010	113
	SENGIR - 007	8
PULAU BESAR - 011		313
	BATU BETUMPANG -	105

	001	
	FAJAR INDAH - 003	105
	PANCA TUNGGAL – 002	56
	SUKAJAYA - 004	10
	SUMBER JAYA PERMAI - 005	37
SIMPANG RIMBA - 020		257
	BANGKA KOTA - 006	49
	GUDANG - 002	25
	JELUTUNG II - 001	31
	PERMIS - 007	16
	RAJIK - 004	58
	SEBAGIN - 003	22
	SIMPANG RIMBA – 005	56
TOBOALI - 030		1228
	BIKANG - 010	9
	GADUNG - 009	96
	JERIJI - 011	10
	KAPOSANG - 008	122
	KEPOH - 014	37
	RIAS - 001	422
	SERDANG - 012	150
	TANJUNG KETAPANG - 003	100
	TELADAN - 002	140
	TOBOALI - 004	142

TUKAK SADAI - 031		336
	BUKIT TERAP - 005	35
	PASIR PUTIH - 002	167
	SADAI - 001	51
	TIRAM - 004	51
	TUKAK - 003	32

Provinsi	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten	02	BELITUNG
Jumlah Rumah Tangga		7589
Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah Tangga
BADAU - 061		902
	AIR BATU BUDING – 006	61
	BADAU - 004	131
	CERUCUK - 003	136
	IBUL - 007	108
	KACANG BOTOR – 005	144
	PEGANTUNGAN - 001	184
	SUNGAI SAMAK - 002	138
MEMBALONG - 010		2055
	BANTAN - 009	165
	GUNUNG RITING – 011	135
	KEMBIRI - 005	197

	LASSAR - 007	195
	MEMBALONG - 002	376
	MENTIGI - 003	156
	PADANG KANDIS – 012	158
	PERPAT - 006	109
	PULAU SELIU - 001	91
	PULAU SUMEDANG – 010	62
	SIMPANG RUSA - 008	191
	TANJUNG RUSA – 004	220
SELAT NASIK - 063		584
	PETALING - 002	54
	PULAU GERSIK - 004	211
	SELAT NASIK - 003	245
	SUAK GUAL - 001	74
SIJUK - 062		1768
	AIR SELUMAR - 004	183
	AIR SERU - 003	247
	BATU ITAM - 001	101
	KECIPUT - 006	184
	PELEPAK PUTE - 010	75
	SIJUK - 007	117
	SUNGAI PADANG – 008	207
	TANJONG TINGGI – 009	89
	TANJUNG BINGA –	330

	005	
	TERONG - 002	235
TANJUNG PANDAN - 060		2280
	AIK KETEKOK - 019	90
	AIK PELEMPANG JAYA - 021	148
	AIK RAYAK - 020	133
	AIR MERBAU - 018	168
	AIR SAGA - 016	250
	BULUH TUMBANG – 007	171
	DUKONG - 011	119
	JURU SEBERANG – 012	124
	KOTA TANJUNG PANDAN - 013	55
	LESUNG BATANG – 009	100
	PAAL SATU - 017	166
	PANGKAL LALANG – 010	195
	PARIT - 014	317
	PERAWAS - 008	91
	TANJUNG PENDAM – 015	153
Provinsi	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten	06	BELITUNG TIMUR

Jumlah Rumah Tangga		3746
Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah Tangga
DAMAR - 031		409
	AIR KELIK - 005	72
	BURUNG MANDI – 003	65
	MEMPAYA - 004	56
	MENGKUBANG - 002	114
	SUKAMANDI - 001	102
DENDANG - 010		544
	BALOK - 008	198
	DENDANG - 004	81
	JANGKANG - 005	114
	NYURUK - 006	151
GANTUNG - 020		502
	BATU PENYU - 009	76
	GANTUNG - 003	98
	JANGKAR ASAM – 002	41
	LENGGANG - 010	76
	LILANGAN - 001	51
	LIMBONGAN - 008	55
	SELINGSING - 004	105
KELAPA KAMPIT - 040		696
	BUDING - 002	104
	CENDIL - 001	55

	MAYANG - 005	223
	MENTAWAK - 003	119
	PEMBAHARUAN – 007	99
	SENYUBUK - 004	96
MANGGAR - 030		1086
	BARU - 006	344
	BENTAIAAN JAYA – 011	45
	BUKU LIMAU - 010	55
	KELUBI - 001	86
	KURNIA JAYA - 005	75
	LALANG - 003	117
	LALANG JAYA - 004	77
	MEKAR JAYA - 012	93
	PADANG - 002	194
SIMPANG PESAK - 011		357
	DUKONG - 003	27
	SIMPANG PESAK – 004	92
	TANJUNG BATU ITAM - 002	136
	TANJUNG KELUMPANG - 001	102
SIMPANG RENGGIANG - 021		152
	AIK MADU - 002	35
	LINTANG - 001	15

	RENGGIANG - 003	41
	SIMPANG TIGA - 004	61

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Untuk mengukur kualitas pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna digunakanlah indikator sebagai berikut:

1. Jumlah Posyantek yang berfungsiditargetkan sebanyak 25 Pos TTG
2. Persentase Desa yang mengelola Sumber Daya Alam dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna ditargetkan sebanyak 100%.

Jumlah kecamatan pos pelayanan teknologi tepat guna yang terbentuk Tahun 2017

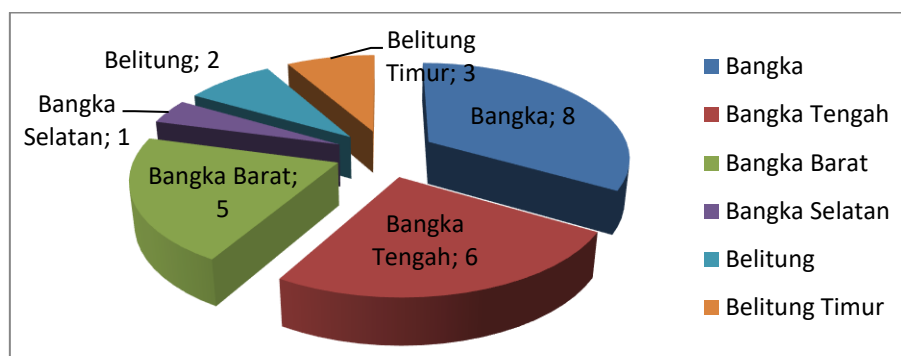
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Posyantek yang berfungsi	25 Pos TTG	25 Pos TTG	100%

Pada table di atas dapat dilihat bahwa realisasi jumlah kecamatan pos pelayanan teknologi tepat guna yang terbentuk dengan target 25 pos TTG realisasi 25 Pos TTG dan capaian 100%. Yang terdiri dari Kabupaten Bangka : Kecamatan Bakam, Belinyu, Riausilip, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Sungailiat dan Pemali. Kabupaten Bangka Tengah : Kecamatan Pangkalan Baru, Namang, Simpang Katis, Sungaiselan, Koba dan Lubuk Besar.

Kabupaten Bangka Barat : Kecamatan Kelapa, Simpang Teritip, Jebus, Parittiga dan Tempilang. Kabupaten Belitung : Kecamatan Sijuk, dan Selat Nasik. Kabupaten Belitung Timur : Kecamatan Kelapa Kampit, Gantung dan Manggar. Kabupaten Bangka Selatan : Kecamatan Tukak Sadai.

GrafikCapaian

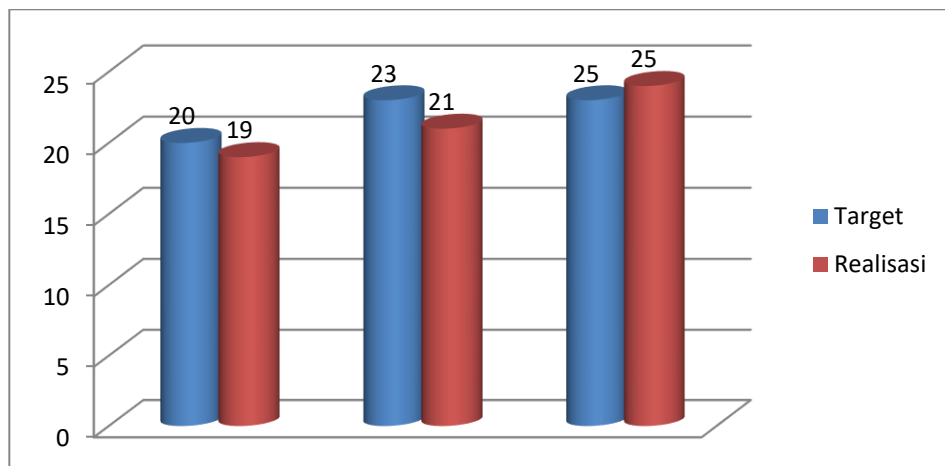
Jumlah kecamatan pos pelayanan teknologi tepat guna yang terbentukTahun 2017



Tahun 2013 tercapai 95 % dari target 20 Kecamatan Pos Pelayanan TTG baru terealisasi 19 Kecamatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang terbentuk.

Terdapat peningkatan jumlah kecamatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang terbentuk di tahun 2017tercapai 100% dari target 25 Kecamatan Pos Pelayanan TTG dan terealisasi 25 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 2 Pos Pelayanan TTG dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GrafikCapaian Jumlah kecamatan pos pelayanan teknologi tepat guna yang terbentuk Tahun 2014 s.d 2017



Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah :

1. Dari seluruh Posyantek yang terbentuk masih ada yang belum berfungsi dan masyarakat kurang mengenal manfaat dari Posyantek.
2. Pada umumnya Posyantek belum mempunyai kantor yang khusus dan masih menumpang.
3. Terbatasnya dana dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.
4. Terbatasnya tingkat pendidikan/pengetahuan dari pengurus Posyantek yang merupakan masyarakat murni.

Solusi atau upaya untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut adalah :

1. Sosialisasi terhadap keberadaan pos pelayanan teknologi tepat guna
2. Pendanaan yang tersedia

3. Penguatan kapasitas pengurus posyantek melalui Pelatihan Posyantekdes.

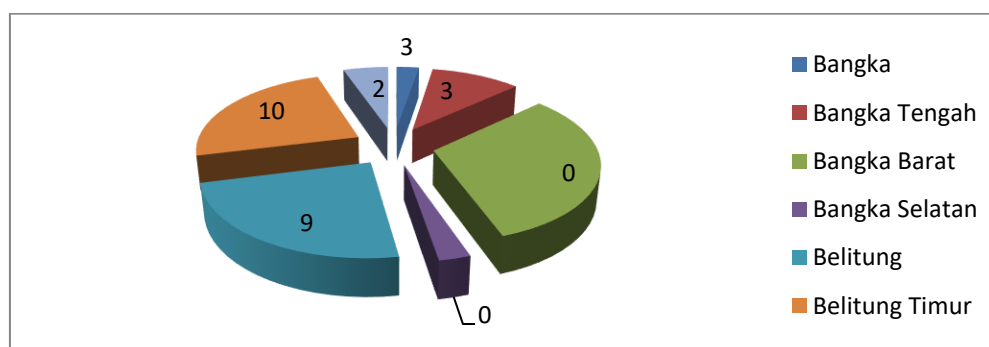
Tabel Persentase desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG	100%	100%	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Persentase desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG dengan target tahun 2017 sebanyak 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. *(data terlampir)*

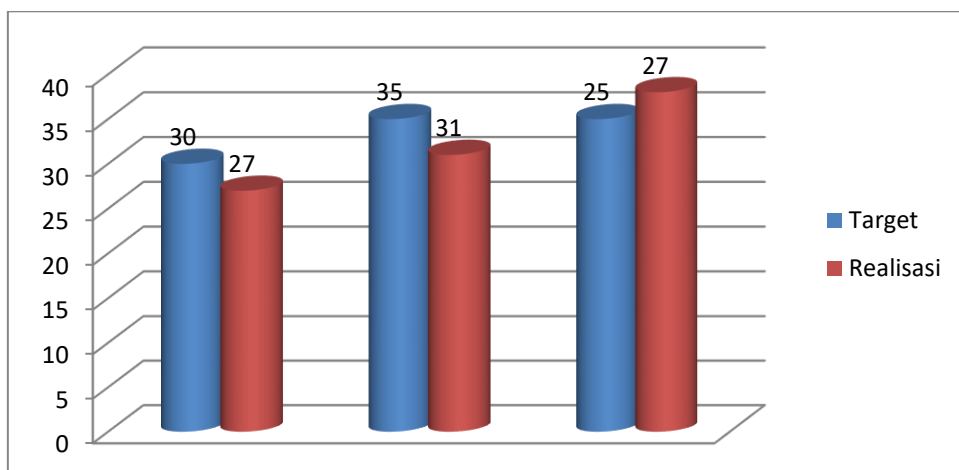
Tahun 2013 tercapai 90% dari target 30 inovasi terealisasi 27 inovasi. Tahun 2017 tercapai 100% dari target 25 inovasi terealisasi 27 inovasi.

Grafik Capaian Jumlah inovasi masyarakat yang berperan aktif dalam membuat alat-alat TTG Tahun 2017



GrafikCapaian

Jumlah inovasi masyarakat yang berperan aktif dalam membuat alat-alat TTG Tahun 2014 s.d 2017



NO	WILAYAH PENCIPTA TTG	NAMA ALAT	KEGUNAAN	NAMA PEMBUAT/PENCI PTA TTG
1	Bangka Tengah			
	Simpang Katis	Mesin Pemotong Rumput Fleksibel	Untuk memotong rumput	
	Namang	Alat penyang/ pembasmi gulma sawah	Menyang/membersihkan gulma pada padi dan sawah	
	Lubuk Besar	Mesin pamarut sagu	Memarut sagu	
2	Bangka			
	Sungailiat	Pemotong umbi-	Memotong umbi-	

		umbian	umbian	
	Sungailiat	Mesin penumbuk bahan baku beras aruk	Menumbuk beras aruk	
	Sungailiat	Mesin parut/sagak umbi-umbian	Memarut umbi-umbian	
3	Pangkalpinang			
	Pangkalpinang	Alat pemeras jeruk	Membuat air jeruk	
	Pangkalpinang	Mesin pemutar keramik dari mesin cuci bekas	Memutar keramik	
	Pangkalpinang	Separator mini/pemisah beras utuh dan patah	Memisah beras yang utuh dan patah	
	Pangkalpinang	Alat potong multi guna manual	Memotong serbaguna	
	Pangkalpinang	Alat pemisah kedelai	Memisahkan kedelai	
	Pangkalpinang	Alat penetas telur	Menetaskan telur	
	Pangkalpinang	Kompas camping	kompas	
4	Belitung			
	Belitung	Lantai penghasil gaya gerak listrik	Menghasilkan gaya gerak listrik	

	Belitung	Pemanfaatan air kelapa	Memanfaatkan air kelapa	
	Belitung	Pupuk cair organik dan media tanam pada hidroponik	sebagai Pupuk cair organik dan media tanam pada hidroponik	
	Belitung	Toring diasir	Pengering media pasir	
	Belitung	Alat Recycle plastik	Mengolah plastik	
	Belitung	Pemotong rumput otomatis	Memotong rumput	
	Belitung	Sensor pendeteksi angin wireless	Mendeteksi angin	
	Belitung	Alat serbaguna dalam pengolahan sampah	Mengolah sampah	
	Belitung	Sensor pendeteksi asap	Mendeteksi asap	
5	Belitung Timur			
	Belitung Timur	Mesin parut kelapa	Pemarut kelapa	
	Belitung Timur	Alat pemotong serbaguna	Pemotong serbaguna	
	Belitung Timur	Mesin penghalus bumbu	Penghalus bumbu	

	Belitung Timur	Alat perontok padi	Alat perontok padi	
	Belitung Timur	Gerinda	Alat Pengasah Parang	
	Belitung Timur	Blender Bumbu	Memotong/menghaluskan bumbu dapur	
	Belitung Timur	Mesin Kompos	Pembuatan Kompos	
	Belitung Timur	Open Surya	Open	
	Belitung Timur	Ontel Cangih	Transportasi	
	Belitung Timur	Kompas Matahari/Solar Cooker	Memasak	

Adapun masalah untuk pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah :

1. Belum semua kabupaten/ Kota ikut serta dalam lomba Teknologi Tepat Guna tingkat provinsi.
2. Anggaran yang tidak disetujui
3. Kurangnya sosialisasi mengenai pembuatan alat-alat TTG

Solusi untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut adalah :

1. Memberikan reward dan diikutsertakan dalam Gelar Karya Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional melalui kegiatan Gelar TTG tingkat nasional
2. Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang menangani hal tersebut
3. Adanya penyediaan anggaran untuk mendukung pembuatan alat-alat TTG.

3.2 Analisi Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Penerimaan Daerah

Jumlah pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2017 adalah nihil.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lainnya PAD yang sah semester II Tahun Anggaran 2017 adalah nihil.

2. Belanja

Jumlah belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semester II tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 26.311.793.418,00 dan realisasinya sebesar Rp. 25.808.334.607,00 atau sebesar 98,09 % dengan perincian sebagai berikut:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 5.440.309.318,00 realisasi sebesar Rp 5.401.989.970,00 atau sebesar 99,29 %.

b) Belanja Langsung

Belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semester II Tahun Anggaran 2017 dianggarkan

sebesar Rp. 20.871.484.100,00 realisasi sebesar Rp. 20.406.344.637,00 atau sebesar 97,77%, terdiri dari:

1). Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester II Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 1.673.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.636.088.000,00 atau sebesar 97,78%

2). Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester II Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 19.152.713.100,00 realisasi sebesar Rp. 18.727.881.637,00 atau sebesar 97,78%.

3). Belanja Modal

Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester II Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 45.571.000,00 realisasi sebesar Rp. 42.375.000,00 atau sebesar 92,99%.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2017 sampai saat ini belum ada hambatan dan kendala yang berarti.

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG APBD SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.871.484.100,00	20.406.344.637,00	97,77
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.857.492.000,00	1.812.963.147,00	97,60
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	26.529.615,00	88,43
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.400.000,00	73.616.522,00	77,17
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	114.510.000,00	114.510.000,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43.992.000,00	43.992.000,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.500.000,00	75.465.000,00	99,95
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	15.813.000,00	63,25
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000,00	33.215.000,00	92,26
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.000.000,00	22.413.000,00	77,29
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00	299.916.610,00	99,97
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	858.090.000,00	858.000.000,00	99,99
13	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah	150.000.000,00	149.642.400,00	99,76
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.961.000,00	231.423.200,00	87,67
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	45.571.000,00	42.375.000,00	92,99
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	66.000.000,00	62.471.000,00	94,65
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	152.390.000,00	126.577.200,00	83,06
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	176.324.500,00	173.433.500,00	98,36
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.874.500,00	108.474.500,00	99,63

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

18	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	64.959.000,00	96,31
D	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	266.223.000,00	253.878.286,00	95,36
19	Survey dan Pengumpulan Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	69.190.000,00	65.183.000,00	94,21
20	Penyelenggaraan Kehumasan	157.033.000,00	150.891.100,00	96,09
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	37.804.186,00	94,51
E	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa	739.917.300,00	723.993.700,00	97,85
22	Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan	124.095.800,00	121.717.200,00	98,08
23	Pembinaan, Monitoring, dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	100.000.000,00	99.544.400,00	99,54
24	Rakor Tupoksi kerja tentang pemerintah Desa 309 Kades dan DPMD 6 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	400.138.000,00	393.864.600,00	98,43
25	Pelatihan Bendahara dan Pengelola Aset Desa dalam pelaksanaan pemahaman terhadap LKPP Desa dalam penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Desa	115.683.500,00	108.867.500,00	94,11
F	Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.191.961.000,00	1.017.479.880,00	85,36
26	Pembinaan dan Dukungan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	167.130.000,00	166.595.700,00	99,68
27	Pelatihan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	133.685.050,00	127.178.130,00	95,13
28	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	395.749.950,00	377.266.650,00	95,33
29	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Desa	495.396.000,00	346.439.400,00	69,93
G	Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	2.984.338.600,00	2.851.410.164,00	95,55
30	Monitoring program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	877.635.750,00	871.455.100,00	99,30

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

31	Pembinaan dan Pendampingan Pokjanal Posyandu	83.766.750,00	79.943.052,00	95,44
32	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	225.229.800,00	223.476.550,00	99,22
33	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.503.656.800,00	1.397.005.762,00	92,91
34	Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUMDES Prov. Kep. Bangka Belitung (BIMTEK Pembinaan Monev dan Bantuan Keuangan)	196.920.000,00	186.651.300,00	94,79
35	Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa	60.000.000,00	55.851.800,00	93,09
36	Pendampingan dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa	37.129.500,00	37.026.600,00	99,72
H	Program Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	448.862.750,00	432.731.660,00	96,41
37	Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Pesisir	-	-	0,00
38	Peningkatan Motivasi Masyarakat Melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi	325.647.000,00	320.760.500,00	98,50
39	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	71.010.800,00	68.370.000,00	96,28
40	Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek	52.204.950,00	43.601.160,00	83,52
I	Program Raskintis	12.942.403.950,00	12.909.031.100,00	99,74
41	Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Rastra) secara Gratis	12.797.974.000,00	12.764.829.500,00	99,74
42	Rakor dan Monev Bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Rastra)	144.429.950,00	144.201.600,00	99,84

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2017, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa”** dengan indikator :
 - Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes, pada tahun 2017 dapat tercapai 100%
 - Presentase Desa yang difasilitasi dengan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa atau Kelurahan yang Mengaplikasikannya
2. Sasaran Strategis kedua **“Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”** dengan indikator :
 - Persentase jumlahDesa/Kelurahan yang berhasilmemfasilitasilembagakemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahandalamhalpembangunan partisipatif capaian kinerja yang diperoleh 100%
 - Persentase desa/Kelurahan yang sudah mempunyai Profil Desa/Kelurahancapaian kinerja yang diperoleh 100%
3. Sasaran Strategis ketiga **“Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat”** dengan indikator :
 - Persentase PKK aktifcapaian kinerja yang diperoleh 100%.
 - Persentase posyandu aktifcapaian kinerja yang diperoleh 100%.

- Jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-ASdi daerah tertinggal dan terpencilcapaian kinerja yang diperoleh 2450 siswa.
4. Sasaran Strategis keempat “**Meningkatnya Usaha Ekonomi Prodiktif Masyarakat Desa**” dengan indikator :
- Persentase Bumdes yang terbentuk dan aktifcapaian kinerja yang diperoleh 147Bumdes.
 - Jumlah Pasar Desa yang telah terbentuk dan aktif, capaian kinerja yang diperoleh 45 pasar desa.
 - Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis, capaian kinerja yang diperoleh 100% (43.018 RTS-PM).
5. Sasaran Strategis kelima “**Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**” dengan indikator :
- Jumlah Posyantek yang berfungsi capaian kinerja yang diperoleh 25 Pos TTG.
 - Persentase Desa yang mengelola Sumber Daya Alam dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Gunacapaian kinerja yang diperoleh 100%.

Untuk indikator yang telah masuk kategori berhasil, maka untuk selanjutnya diupayakan agar tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan capaian kinerjanya. Sedangkan indikator kinerja yang termasuk kategori cukup berhasil, perlu dilakukan upaya maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik lagi. Di tahun mendatang diharapkan indikator kinerja sasaran sudah ada di level outcome, tentunya disertai dengan komitmen dan keinginan bersama dari sektor terkait dan sektor kabupaten/kota.